



LAPORAN TAHUNAN INFID 2021



LAPORAN TAHUNAN INFID 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	V
KATA PENGANTAR	VI
PERJALANAN INFID SEPANJANG 2021	VIII
INFID DALAM ANGKA	XIV
TESTIMONI JARINGAN INFID	XVI
DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS	XIX
EKSEKUTIF DAN PROGRAM	XX
BAB I : PROFIL 36 TAHUN PERJUANGAN INFID	1
BAB II : PROGRAM INFID 2021	5
A. Program HAM dan Demokrasi	5
B. Program Penurunan Ketimpangan	25
C. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	30
Bab III INFID DALAM MEDIA	43
Media Massa	43
Media Sosial	43
Bab IV INFID DI TENGAH MASYARAKAT	46
A. Dampak Nyata Kerja INFID	46
B. Inovasi Program	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR SINGKATAN

ADA	Asia Development Alliance
AIDA	Aliansi Indonesia Damai
AND	Asia Democracy Network
AGPAII	Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
Apindo	Asosiasi Pengusaha Indonesia
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	Aparat Sipil Negara
Bakesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
CSO	Civil Society Organization
C20	Civil Society 20
C-Save	Civil Society against Violent-Extremism
DASPR	Division for Applied Social Psychology Research
DDI	Digital Divide Index
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FGD	Focus Group Discussion
GT BHAM	Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM
G20	Government 20
HAM	Hak Asasi Manusia
ICSR	International Center for the Study of Radicalization
IKa	Indonesia untuk Kemanusiaan
IPAC	Institute for Policy Analysis of Conflict
ISIS	Islamic State of Iraq and Syria
KBB	Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KSBSI	Konfederasi Serikat Buruh Indonesia
KSPN	Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
KSPSI	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
KSP BUMN	Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara
K/L	Kementerian/Lembaga

LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
MEL	Monitoring, Evaluation, and Learning
MoU	Memorandum of Understanding
NAT	Need Assessment Tool
NU	Nahdlatul Ulama
KSP	Kantor Staf Presiden
OGI	Open Government Indonesia
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah

KATA PENGANTAR



Tahun 2021 Indonesia masih berjuang mengatasi pandemi. Pemerintah Indonesia mengerahkan semua daya lahir-batin untuk bisa mengerem dan mengendalikan pandemi. Hasilnya, Indonesia mencapai vaksinasi di atas 60 persen, bahkan vaksin *booster* sudah dilaksanakan. Selama tahun 2021, beberapa hal menarik yang dikerjakan INFID antara lain sebagai berikut.

Pertama melaksanakan **advokasi kebijakan**. **Dua hal** menarik untuk ditampilkan mengenai advokasi ini adalah 1) Advokasi pendanaan bagi CSO. Bersama Pokja CSO yang terdiri dari Konsil LSM, Kapal Perempuan, TII, Remdec, IKA Prakarsa dan sebagainya, INFID mendukung Bappenas - KSP telah menggelar kajian-penelitian dan penyusunan dokumen, 2) INFID terus melakukan advokasi RUU TPKS bersama-sama mitra kerja dan koalisi besar organisasi perempuan, CSO. RUU tersebut akhirnya disahkan pada awal tahun 2022. INFID memproduksi lima dokumen pendukung untuk kepentingan ini, yaitu satu kertas kebijakan, dua *briefing paper*, satu kertas posisi, dan satu rekomendasi kebijakan. Kelima dokumen tersebut merupakan sumber penting bagi kerja advokasi pengesahan RUU P-KS dan pengurangan prevalensi perkawinan anak.

Kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan **penguatan demokrasi dan HAM**, di antaranya adalah 1) Menyelenggarakan Festival HAM 2021 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, didukung oleh Komnas HAM dan KSP, 2) Memberikan dukungan kepada *stakeholder* strategis dalam upaya memajukan moderasi beragama, termasuk memberikan dukungan penguatan kapasitas kepada Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) dan media massa Islam moderat, termasuk Nu Online, IB Times and Arrahim, 3) Konferensi internasional berbagi pengalaman Indonesia kepada mitra-mitra kerja dan organisasi Islam di Malaysia, Tunisia, Pakistan dalam upaya memajukan Islam *rahmatan lil alamin* yang dibuka oleh Wapres, Ketua PP Muhammadiyah, dan PBNU, 4) Melaksanakan Sekolah Demokrasi Online untuk pemerintah daerah dan CSO dalam bentuk *online* kerja sama dengan LKIS Yogyakarta.

Ketiga, dibawah **Program SDG**, INFID telah menyelesaikan 1) Riset

kerja sama dengan BRIN-LIPI dalam upaya mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi Indonesia di era digital berkaitan dengan ketimpangan gender dalam dunia digital. Penelitian menemukan bahwa Indonesia masih memiliki PR untuk mengatasi *Digital Divide Index* (DDI dan peran CSO untuk mengatasinya, 2) Mendukung pengembangan laporan VNR Indonesia dengan menampilkan hasil kerja lembaga lembaga non-pemerintah, 3) Melakukan survei keadaan CSO Indonesia karena dampak pandemi yang dijadikan dasar dan rujukan pengembangan kebijakan pendanaan CSO, 4) Mendampingi dan memperkuat kapasitas *Open Government* di dua kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Banggai, yang terpilih sebagai *local OGP*.

Keempat, bidang **Kelembagaan**. Anggota INFID per Desember 2021 berjumlah 86 lembaga dan dua individu. Kedelapan puluh delapan anggota ini bergabung dalam *Whatsapp Group* yang cukup aktif memberikan tanggapan atas informasi yang diberikan sekretariat. Ada 20 jenis informasi yang dibagikan sekretariat kepada anggota, di antaranya peluang pendanaan untuk organisasi masyarakat sipil. Selain itu, sekretariat melakukan kegiatan survei sebanyak lima kali untuk menjangkau pendapat mereka sebagai langkah perbaikan, baik dari sisi programatik maupun kelembagaan. Dalam menjalankan aktivitas melalui berbagai program, INFID bekerja sama dengan pihak lain/mitra berdasarkan kesepakatan yang dituangkan di dalam nota kesepahaman yang dibuat bersama. Sepanjang 2021 terdapat 12 MoU yang telah ditandatangani INFID dengan berbagai mitra dan lembaga.

Kelima, dalam bidang **Pendanaan dan Keuangan**. Kinerja keuangan INFID semakin membaik. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, ada kenaikan jumlah dana yang dikelola lebih dari dua kali lipat, termasuk donasi lokal. Kenaikan ini sekaligus dapat dikatakan merupakan salah satu wujud kepercayaan pemangku kepentingan kepada INFID, yang tidak terbangun dalam waktu singkat. Hal ini merupakan dampak positif atas akumulasi dari peningkatan kapasitas dan berbagai hasil yang dicapai atas kerja keras INFID, termasuk melalui kerja-kerja kemitraan dan kerja sama dengan pihak luar selama beberapa tahun terakhir.

Jakarta, Juni 2022

Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif

PERJALANAN INFID SEPANJANG 2021

Program. Pandemi COVID-19 terus berkepanjangan hingga tahun 2021. Kerja yang sangat mengandalkan teknologi yang awalnya merupakan langkah mitigasi dalam menghadapi berbagai restriksi mobilisasi masyarakat oleh pemerintah pada tahun 2020 telah berubah menjadi pola kerja yang mendominasi INFID sepanjang tahun 2021. Sebagian besar pekerjaan dapat diselesaikan tanpa harus keluar dari rumah. Pekerjaan yang memaksa pertemuan fisik harus terjadi dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Luring, daring, dan *hybrid* pun menjadi kosa kata yang akrab di telinga.

Ketiga metoda kerja di atas membuat INFID dapat mencapai target program HAM dan Demokrasi sesuai dengan rencana. Proyek Bisnis dan HAM telah menghasilkan kertas kebijakan bisnis dan HAM ini dikembangkan berdasarkan kajian meja atas 100 beragam dokumen berasal dari otoritas baik di tingkat nasional maupun internasional.

INFID pun mendapat kepercayaan menjadi salah satu wakil dari unsur non-pemerintah dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GT BHAM) yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM. Gugus tugas ini memiliki mandat untuk mengoordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM di tingkat nasional. INFID dipilih menjadi salah satu mitra non-pemerintah di dalamnya. Penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) merupakan salah satu agenda utama GTN BHAM.

Selain perubahan yang diharapkan terjadi di sektor bisnis, INFID juga melakukan upaya memajukan demokrasi dan HAM di kalangan pemerintah, secara spesifik pemerintah kota dan kabupaten, lewat Proyek Kabupaten/Kota HAM. Proyek ini bertujuan mengarusutamakan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia dan memastikan praktik pemerintahan di daerah berasaskan pada HAM. Sebagai pendukung, INFID telah menyelesaikan penulisan dua buku berkaitan dengan Kabupaten/Kota HAM di Indonesia. Buku pertama berjudul *Human Rights Cities in Indonesia*. Buku lain yang ditulis oleh

INFID adalah *Kajian Indikator Kabupaten/Kota HAM: Studi Praktik Penyelenggaraan Kota HAM di Dunia dan Indonesia*. Buku ini menyediakan materi tentang prinsip dan indikator Kabupaten/Kota HAM yang dapat digunakan untuk merencanakan pembentukan Kabupaten/Kota HAM.

INFID bekerja sama dengan Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Pemerintah Kota Semarang mengadakan Festival HAM 2021 dengan tema "Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi, dan Resiliensi." Festival ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan INFID sejak tahun 2014. Festival HAM, sebelumnya bernama Konferensi Kabupaten/Kota HAM, bertujuan sebagai forum berbagi pengalaman keberhasilan pemerintah daerah dalam mempraktikkan pembangunan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan unsur budaya lokal.

Di tingkat internasional pengalaman yang sama dibagikan dalam forum tahunan World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2021 yang diselenggarakan Kota Gwangju, Korea Selatan. Melalui sesi khusus yang diberikan kepada Indonesia, INFID dan Komnas HAM RI menunjukkan praktik-praktik baik Kabupaten/Kota HAM di Indonesia kepada dunia internasional. Tema yang diangkat adalah "Human Rights Cities in Indonesia: *Human Rights Cities as a Strategy and Practice to Promote Tolerance and Freedom of Religion and Belief across Indonesia.*"

Isu yang tidak kalah penting terkait dengan pemajuan HAM dan Demokrasi adalah penanganan paham dan praktik yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan. INFID menyusun kertas kebijakan berkaitan dengan penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak mantan ISIS disertai analisis. Efektivitas kebijakan tersebut dikaitkan dengan pengalaman Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur yang didapatkan saat melakukan penanganan dan pendampingan deportan dan returni.

Masih dalam kerangka memperkuat demokrasi dan toleransi, bersama Yayasan LKiS Yogyakarta mengembangkan modul Sekolah Demokrasi Online. Dalam upaya mendorong implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, INFID bekerja sama dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengembangkan modul "Peningkatan Kompetensi

Guru Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI.”

Selama tahun 2021 INFID mengerjakan 5 (lima) riset. Dua di antara kelima riset tersebut telah diselesaikan dan sekaligus dipublikasikan di tahun yang sama, yaitu “Peran Organisasi Perempuan Berbasis Keagamaan dalam Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme Berkekerasan” dan “Gerakan Ekstremisme di Sepuluh PTN Pasca-Perppu Ormas.”

Sebagai salah satu langkah konkret keberlanjutan hasil riset, INFID bekerja sama dengan empat media, yaitu NU Online, IBTimes.ID, Islami.co, dan Arrahim.id untuk mengembangkan hasil temuan dan rekomendasi riset menjadi material kampanye dan dikemas dalam bentuk yang lebih populer dan ringan untuk menjangkau publik secara lebih luas.

Dalam menyelesaikan masalah ketimpangan yang dialami kelompok marginal, perempuan menjadi salah satunya, INFID melakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat nasional dan daerah. Pada tahun 2021, INFID bersama berbagai organisasi lain mendorong merumuskan kebijakan untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan melaksanakan Amandemen UU Perkawinan 1974. INFID memproduksi lima dokumen pendukung untuk kepentingan ini, yaitu satu kertas kebijakan, dua *briefing paper*, satu kertas posisi, dan satu rekomendasi kebijakan. Kelima dokumen tersebut merupakan sumber penting untuk kerja advokasi pengesahan RUU P-KS dan pengurangan prevalensi perkawinan anak.

Dalam rangka kepentingan penyadaran publik, INFID menyusun materi kampanye berupa tujuh video pendek, termasuk di dalamnya pandangan tokoh agama dan infografis yang dikembangkan dari hasil survei dan studi kualitatif atas RUU P-KS dan Revisi UU Perkawinan. Materi kampanye ini disebarluaskan melalui akun media sosial INFID (Instagram, Twitter, Facebook) dan situs resmi. Kampanye ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Selain itu, semakin banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menunjukkan dukungan pengesahan RUU P-KS, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil.

Riset kembali menjadi tulang punggung dalam kerja INFID. Dalam proyek

ini INFID telah menyelesaikan riset kuantitatif. Dalam upaya memberikan advokasi berbasis bukti mengenai layanan kesehatan Indonesia, khususnya dalam pandemi COVID-19, bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selain itu, riset juga memeriksa kualitas jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Lebih khusus lagi, riset juga menyediakan informasi tentang kinerja layanan kesehatan pada perempuan selama masa pandemi COVID-19.

Masih dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), INFID telah menghasilkan kajian pemetaan aktor dalam isu pembangunan rendah karbon di parlemen yang digunakan sebagai pijakan saat menyelenggarakan webinar “Mendorong Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon untuk Anggota DPRD dan Stakeholders,” diskusi kelompok terfokus “Pembangunan Rendah Karbon dan Dukungan Parlemen,” dan audiensi dengan Kaukus Ekonomi Hijau di parlemen. Dalam rangka kegiatan penyadaran publik, INFID telah memproduksi *podcast* “Hambatan dan Tantangan dalam Mendorong Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia” dan menyelenggarakan *talk show* “Stimulus Fiskal Hijau untuk Pembangunan Rendah Emisi melalui APBN.”

Di bidang kesehatan, INFID berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) untuk melakukan sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik.

Dalam isu *digital gender gap*, INFID menyusun riset untuk menjawab peran OMS untuk mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi Indonesia di era digital dan memberikan gambaran pendekatan teoritis maupun konseptual berkaitan dengan ketimpangan gender dalam dunia digital. Penelitian mengembangkan kerangka konseptual yang diadopsi dari empat level akses terhadap teknologi informasi dan komputer dan sebagian Digital Divide Index (DDI). INFID telah menyelenggarakan seminar nasional untuk diseminasi hasil riset “Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital” dan melakukan *audiensi policy brief* kepada 5 kementerian/lembaga terkait.

Masih berkaitan dengan TPB, salah satu kegiatan yang dilakukan INFID adalah menyusun kajian “Persepsi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan

Agenda Pembangunan TBP 2030". Kajian ini dilatarbelakangi mendesaknya pelaksanaan agenda TPB yang efektif dan komitmen dari pemerintah untuk pencapaian 17 TPB pada 2030. INFID memandang kebutuhan untuk pelibatan masyarakat sipil dalam prosesnya, serta untuk menemukan cara inovatif yang memungkinkan semua suara didengar. INFID juga menyelenggarakan serangkaian diskusi kelompok terfokus untuk penyusunan riset "Scorecard Warga 2021 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". Kegiatan ini bertujuan menggali suara masyarakat sipil dalam mengevaluasi pencapaian TPB untuk enam tahun terakhir dan menganalisis rekomendasi untuk implementasi SDGs lebih inklusif dan partisipatif.

Kegiatan lain yang tidak kalah strategis adalah penyusunan dokumen pendukung untuk proposal pendanaan dari negara untuk OMS. Demokrasi yang ideal hanya bisa tercapai jika negara kuat dan masyarakat sipil juga tidak kalah kuat. Sepanjang tahun 2021 bersama kelompok kerja, INFID telah menyelesaikan *background paper*, draf Peraturan Presiden dan naskah akademis sebagai pijakan untuk mendorong advokasi Peraturan Presiden tentang pendanaan bagi OMS.

Kelembagaan. Tidak ada perubahan jumlah anggota INFID di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggota INFID per Desember 2021 berjumlah 86 lembaga dan dua individu. Kedelapanpuluh delapan anggota ini bergabung dalam Whatsapp Group yang cukup aktif memberikan tanggapan atas informasi yang diberikan oleh sekretariat. Ada 20 jenis informasi yang dibagikan sekretariat kepada anggota, di antaranya adalah peluang pendanaan untuk organisasi masyarakat sipil. Selain itu, sekretariat melakukan kegiatan survei sebanyak lima kali untuk menjaring pendapat mereka sebagai langkah perbaikan, baik dari sisi programatik maupun kelembagaan. Dalam menjalankan aktivitas melalui berbagai program, INFID bekerja sama dengan pihak lain/mitra berdasarkan kesepakatan yang dituangkan di dalam nota kesepahaman yang dibuat bersama. Sepanjang 2021 terdapat 12 MoU yang telah ditandatangani INFID dengan berbagai mitra dan lembaga.

Pada tahun 2021 INFID telah memperbaharui 6 SOP (*Standard Operating Procedure*) yang ada, yaitu: kelembagaan, keuangan, program dan penelitian, *monitoring, evaluation, dan learning* (MEL), ketenagakerjaan, serta pertemuan luring terkait pandemi COVID-19. Pembaharuan ini

diberlakukan salah satunya untuk peningkatan kualitas kerja dan hasil.

Keuangan. Kinerja keuangan INFID semakin membaik. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 ada kenaikan jumlah dana yang dikelola lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 2020 jumlah dana sebesar Rp. 10.973.458.559 yang dihimpun dari sebelas sumber, termasuk donasi lokal, sedangkan pada tahun 2021 jumlah meningkat menjadi Rp 21.147.520.280 yang dihimpun dari 17 sumber, termasuk donasi lokal.

Prestasi menggembirakan ini justru muncul di saat ada kecenderungan secara global penurunan jumlah dana yang diberikan kepada sektor sosial. Hampir ada kesamaan pola yang terjadi di berbagai negara, pemotongan anggaran di berbagai sektor dilakukan pemerintah dan hasil pemotongan digunakan untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19 dari aspek kesehatan, bantuan sosial pada masyarakat yang terkena dampak, dan intervensi lain untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pemotongan ini juga terjadi pada dana publik.

Kenaikan ini sekaligus dapat dikatakan merupakan salah satu wujud dari kepercayaan pihak luar terhadap INFID yang tidak terbangun dalam waktu singkat. Hal ini merupakan dampak positif atas akumulasi dari peningkatan kapasitas dan berbagai hasil yang dicapai dari kerja keras INFID dalam menjalankan kemitraan dan kerja sama dengan pihak luar selama beberapa tahun terakhir. Lebih dari itu, kepercayaan pihak luar dapat dikatakan sebagai konfirmasi atas relevansi peran dan keberadaan INFID dalam memajukan peran negara, sektor bisnis dan masyarakat sipil untuk memperbaiki kehidupan menuju ke arah yang lebih baik di bidang demokrasi dan HAM, penurunan ketimpangan, dan pembangunan berkelanjutan.

INFID DALAM ANGKA



36 tahun Usia INFID



297 Kegiatan sepanjang 2021

Program SDGs:

146 Kegiatan

**Program Pengurangan
Ketimpangan:**

12 Kegiatan

Program HAM:

139 Kegiatan (BHR & HRC : 25)

Jumlah Penerima Manfaat Langsung (Termasuk Festival HAM):



2.913
orang



1.188 (41%)

Laki-laki



1.729 (59%)

Perempuan

Penerima manfaat SDGs 2021:

Perempuan 301, laki-laki 310, total 611

Peserta Festival HAM:

1.092 (60 %) Laki-laki dan 740 (40 %
Perempuan, total 1.832 orang



**Total
229 Liputan**

134
Liputan HAM

45
Liputan SDGs

33
Liputan Penurunan
Ketimpangan

17
Liputan Non-Kategori

Media Sosial:



Facebook: Sebanyak 7.021 yang menyukai



Instagram: Followers 4.215



Twitter: Followers 4.129



YouTube: Subscribers 1.183, (2021 tambah 402) Video
tambah 49 menjadi 184 (135 tahun 2020)



**Kinerja Portofolio
Pendanaan 2021**

11.5 Milyar rupiah



Pemberi Dana:

FF-BUILD, GLOBAL CENTER, NED , Local Donation, NETHERLAND EMBASSY,
USAID-HARMONI, UNDP, FF - POKJA CSO, WRI/PRAKARSA, Oxfam - GRAISEA 2,
KURAWAL FOUNDATION, C20 - OXFAM GB, USAID-MADANI, JANIC, P R N - Ristek,
A4SD - GCAP FORD - (IIEF-LEARN)



Struktur Lembaga:

Ada 3 Dewan Pengawas, 7 Dewan Pengurus, 5 Penasehat Ahli, dan 21 Staf.

KEGIATAN BESAR INFID



TESTIMONI JARINGAN INFID



Drs. Wariki Sutikno, MCP
Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS

Kami mengapresiasi kontribusi INFID untuk terus bersama-sama mewujudkan konsolidasi demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kolaborasi antara Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/ Bappenas dengan INFID pada tahun 2021 telah menghasilkan suatu terobosan untuk program/kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

INFID telah memberikan kontribusi nyata untuk menjadi penggerak dalam memperkuat peran OMS di Indonesia. Kami optimis dengan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, peningkatan kualitas dan kapasitas OMS dapat terwujud.



Riswati
Direktur Eksekutif Flower Aceh

Flower Aceh bekerja sama dengan INFID untuk program SDGs mulai pada tahun 2007 untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Banda Aceh. Proses ini dimulai dengan sangat menarik, karena diawali dengan penguatan pemahaman dan kapasitas terkait dengan isu SDGs kepada lembaga.

Proses ini telah membuahkan hasil yang sangat baik. Kota Banda Aceh saat ini telah mempunyai Rencana Aksi Daerah dan juga Peraturan Walikota tentang SDGs, dan banyak

lembaga yang terlibat dalam pengisian matrik SDGs bersama pemerintah.



Oli Henman

Koordinator *Global Action for Sustainable Development*

Di *Action for Sustainable Development*, kami sangat menghargai kemitraan kami dengan masyarakat sipil (OMS) nasional, pendekatan kami adalah untuk mendukung pembelajaran horizontal dan kolaborasi timbal balik. INFID bekerja secara dinamis dan profesional dalam mengoordinasikan masukan OMS yang luas bagi proses VNR, menyiapkan laporan independen mereka sendiri, dan memasukkan laporan komparatif “People’s Scorecard”

INFID adalah mitra yang efektif dan andal dengan keahlian kebijakan yang kuat, yang berakar pada pengalaman langsung dari aliansi OMS yang luas. Kami menantikan kolaborasi di masa depan karena agenda 2030 mencapai titik tengah perjalanan pada tahun 2023.



Nila Wardani

Direktur RUMPUN, Malang, Jawa Timur

INFID memiliki fokus yang kuat mengenai kerja-kerja advokasi berkaitan dengan RUU-PKS dan UU Perkawinan. Advokasi dilakukan melalui penggalan data dan bukti yang kuat untuk menunjukkan urgensi dua undang-undang tersebut melalui serangkaian penelitian lapangan dan diskusi-diskusi terfokus dan mendalam dengan beragam organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus isu dan konsisten yang sama.

Saya terus mendukung kerja-kerja advokasi yang sistematis dan strategis yang dilaksanakan INFID dengan terus mengawal RUU menjadi UU, hingga di tingkat pengawalan ada pengembangan regulasi turunannya.



Marthen Luther Johannes Paul SinlaEloE (M.L.J. Paul SinlaEloE)
Divisi Advokasi PIAR, Kupang, NTT

Terus terang, pada masa pandemi COVID-19, PIAR-NTT tengah mendampingi tiga kasus kekerasan seksual dan korban pemerkosaan terhadap anak. Di tengah kesulitan ini, INFID hadir memberdayakan kami, baik dalam konteks membangun kapasitas maupun memberi kesempatan untuk menyelenggarakan dialog publik tentang RUU P-KS.

INFID diharapkan berpikir cara menguatkan masyarakat sipil berhadapan dengan kondisi negara yang belakangan ini cenderung meminggirkan peran masyarakat sipil, khususnya dalam memajukan HAM dan menghentikan korupsi.



Prof. Ahmad Zainul Hamdi, Senior Researcher INFID
Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saya merasa INFID berhasil mengembangkan isu yang oleh banyak kalangan bersifat *security approach* ini menjadi kerja-kerja sosial kemanusiaan yang beririsan dengan berbagai isu lain, semisal perdamaian, gender, demokrasi, dan multikulturalisme.

Saya hampir terlibat di seluruh proses, mulai dari penyusunan rencana program hingga evaluasi. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai '*success story*' dari kemitraan dengan INFID adalah keberhasilan Arrahim.id (media yang saya dirikan dan pimpin) membangun studio *podcast* yang berfungsi sebagai penyebaran gagasan-gagasan perdamaian dan sarana edukasi publik.

DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

DEWAN PENGURUS



Dian Kartikasari
Ketua



Totok Yulianto
Wakil Ketua



Nawawi Bahrudin
Sekretaris



Teddy Alfonso
Bendahara



Sarah Lery Mboeik
Anggota



Suryati Simanjuntak
Anggota



Odi Shalahuddin
Anggota

DEWAN PENGAWAS



Khairani Arifin



Puspa Dewi



Istiatun

PENASEHAT AHLI



Zumrotin K. Susilo



Muhammad AS Hikam



**Mickael Bobby
Hoelman**



Bagus Takwin



Aris Arif Mundayat

EKSEKUTIF DAN PROGRAM



Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif



Tatat
Program Manager & PO on
Inequality



Aditiana Dewi Eridani
Senior Program Officer on
Partnership & Membership



Abdul Waidl
Senior Program Officer on
Human Rights and Democracy



Aulia Rachmah Putri
Program Officer on Human
Rights and Democracy



Bona Tua P.P (Bona)
Program Officer on Sustainable
Development Goals/SDGs



Megawati
Program Assistant on Inequality



Sanita Rini
Program Assistant on Preventing
Violent Extremism/PVE



Denisa Amelia Kawuryan
Program Assistant on SDGs



Alyaa Nabiilah Zuhroh
Program Support on Human
Rights & Democracy



Rizka Antika
Program Assistant on Promoting
Tolerance and Respect for
Diversity



Jeckson Robinson
Program Assistant



Intan Kusumaning Tyas
Communication & Campaigner
Officer



Misnawati Syamsir
Finance Manager



Ima Desiyanthi
Accounting Officer



Rini Widyastuti
Finance and Budgeting



Florence
HRD Manager



Suwarno
IT & Procurement Officer



Sabarno
Operational Officer



Wasiton
Assistant Operational Officer

BAB I

PROFIL 36 TAHUN PERJUANGAN INFID

Pada tahun 2022 ini INFID telah berusia 36 tahun. Selama kurun waktu itu beberapa capaian dapat disebutkan, misalnya 1) Dipercaya menjadi simpul C20 untuk Presidensi G20 Indonesia, 2) Dipercaya menjadi Steering Committee (SC) dalam Open Government Indonesia, 3) Pada tahun 2017 memperoleh penghargaan dari Kemendagri sebagai lembaga sosial kemanusiaan, 4) Jumlah dana yang dikelola semakin meningkat sebagai bukti kapasitas dan kepercayaan kepada lembaga, dan 5) Jumlah anggota dan mitra kerja yang meluas.

Pekerjaan dan kinerja INFID tidak berbeda dengan lembaga-lembaga nirlaba lain, yaitu seberapa jauh ia telah memberikan manfaat kepada publik, seberapa luas sumbangannya terhadap pemecahan masalah publik, dan sebagai lembaga seberapa jauh dapat dipercaya mengelola dana dan program.

Beberapa pembelajaran yang bisa dipetik adalah, **pertama**, tidak ada jaminan sebuah lembaga akan terus hadir dan kuat. Sebuah lembaga akan menghadapi masa masa pasang dan surut. **Kedua**, agar terus hadir dan relevan-responsif, sebuah lembaga harus dikelola dengan sungguh-sungguh dan selalu dapat dipercaya (*credible*).

Mengapa kepercayaan menjadi kata kunci? Karena ia lembaga nonprofit, mendapatkan dana dari publik dan karena ia mendapatkan mandat kerjanya dari anggotanya. Guna memastikan kepercayaan publik, ada beberapa langkah strategis "internal" yang ditempuh sejak 2013 dengan tujuan agar secara manajemen dan sosial lembaga menjadi adaptif, relevan, dan menghadirkan manfaat bagi publik dan anggota anggotanya.

Pertama, meskipun tata kelola sudah terbuka dan demokratis, yaitu adanya Dewan Pengurus dan Direktur yang memimpin Sekretariat, keterbukaan dan akuntabilitas lembaga tetap perlu dilakukan hingga ke level mikro. Oleh karena itu, sejak 2012/2013 INFID menempuh upaya menerbitkan laporan

tahunan dan laporan keuangan yang sudah diaudit. Keduanya menjadi jendela bagi pihak luar untuk melihat capaian dan kinerja lembaga.

Kedua, lembaga yang tidak memiliki standar kerja dan jaminan mutu, akan tidak dipercaya sebagai lembaga kredibel oleh publik. Oleh karena itu, secara bertahap telah dilaksanakan penguatan standar dan proses-proses manajemen program/proyek dan manajemen keuangan, termasuk di dalamnya **pembuatan berbagai SOP** program, keuangan, dan monev untuk memastikan pelaksanaan dan mutu pelaksanaan program. Hingga tahun 2021, setidaknya sudah ada 6 dokumen SOP yang tiap tahun diperbaiki atau dimutakhirkan.

Ketiga, sebagai lembaga yang tugas pokoknya adalah advokasi kebijakan, yang bertumpu pada proses-proses riset yang harus terjamin mutunya, maka salah satu inisiatif dan tradisi yang mulai dilaksanakan sejak 2012/2013, adalah **proses peer review** kepada semua pekerjaan riset dan penyusunan dokumen dalam lingkungan INFID. *Peer review* ditujukan untuk menjamin dan memastikan kualitas tinggi dari setiap dokumen dan laporan yang dikerjakan. Narasumber *peer review* tidak saja melibatkan staf internal INFID, tetapi juga melibatkan praktisi dan ahli dari luar, termasuk kementerian dan lembaga.

Keempat, manajemen keuangan terus menerus diperbaiki, baik dengan menambah SDM maupun modernisasi manajemen keuangan termasuk dengan menerapkan **sistem keuangan online** (m-banking), sehingga urusan keuangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan transaksi dapat dilakukan secara *real time*.

Kelima, keberlanjutan lembaga akan terjamin dengan SDM dan keahlian yang memadai. **SDM dan keahlian** yang mencukupi, menjadikan lembaga mampu menciptakan program-program dan hasil program bermutu. Program-program yang bermutu menjadikan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan semakin terjaga dan menguat. Oleh karena itu, lembaga terus-menerus memperkuat diri dengan SDM yang relevan, termasuk di dalamnya **komunikasi dan pengembangan program**.

Bagaimana dengan langkah strategis "**eksternal**" yang sudah dilakukan selama ini untuk memastikan lembaga responsif dalam ikut serta

memecahkan tantangan pembangunan nasional dan internasional?

Pertama, INFID menceburkan diri ke dalam kancah advokasi kebijakan yang sedang menjadi tuntutan nasional dan dunia, misalnya aktif dalam perumusan dan pengesahan SDG, pemajuan HAM, dan dalam penurunan ketimpangan. Langkah ini ditempuh sebagai jawaban atas kedudukan dan peran lembaga dalam rentang kebijakan publik yang sedang terjadi dan atau menjadi fokus pemerintah Indonesia, tetapi juga lembaga-lembaga internasional.

Kedua, sebagai lembaga advokasi kebijakan, ketersediaan bukti-bukti dan temuan-temuan ilmiah menjadi syarat wajib. Oleh karena itu, lembaga memulai inisiatif baru dengan dengan cara menghasilkan suara-suara warga, terutama melalui survei dan kajian kualitatif. Survei warga menjadi ciri khas dan hasil kerja lembaga untuk memajukan kebijakan publik. Setidaknya hingga tahun 2022, INFID telah menghasilkan lebih dari 10-12 hasil survei warga yang sudah diserahkan kepada pemerintah.

Ketiga, sebagai bagian dari komunitas pembangunan di Indonesia dan internasional, INFID secara rutin membuat pertemuan bilateral dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintah dan donor dengan tujuan antara lain memperkenalkan lembaga dan membuka kemungkinan kerja sama dalam pelaksanaan program-program lembaga. Salah satu kegiatan yang ditempuh adalah pertemuan dengan lembaga donor/mitra untuk memperkuat kerja sama dengan anggota dan mitra kerja INFID.

Keempat, untuk memperbesar jumlah dan jenis SDM dan keahlian yang dapat mendukung kerja lembaga, maka lembaga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi generasi muda melalui berbagai cara, termasuk di antaranya melalui INFID Research Fellow, INFID Fellow, dan kerja magang bagi anak muda yang baru lulus kuliah.

Kelima, secara bertahap terus memperluas modal sosial lembaga dengan cara, 1) Memperluas jumlah anggota. Kini jumlah anggota resmi lembaga menjadi 88, ada tambahan 19 organisasi pada tahun 2020, 2) Memperluas jumlah mitra kerja termasuk universitas, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga.

Keenam, terus-menerus merawat jaringan kerja dan mitra internasional.

Itulah sebabnya INFID tetap dikenal di berbagai jaringan internasional. Antara lain INFID merawat kehadiran dalam *Asia Democracy Network (AND)*, *Asia Development Alliance (ADA)*, *Forus*, dan *Open Government Program (OGP)*, dan sebagainya. Di masa lalu ketika INFID berdiri pada pertengahan tahun 1980-an, tidak banyak lembaga Indonesia yang memiliki jaringan kerja internasional. Pasca-reformasi 1998, Indonesia menjadi lebih terbuka dan semua OMS bebas bekerja sama dan bermitra dengan OMS internasional.

BAB II

PROGRAM INFID 2021

A. Program HAM dan Demokrasi

Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi sepanjang tahun 2021. Kemajuan ditunjukkan oleh kenaikan skor Indeks Demokrasi dari 6,30 pada tahun 2020 menjadi 6,71 pada tahun 2021. Kenaikan ini menempatkan Indonesia pada peringkat 52 dunia, atau naik setinggi 12 dibandingkan posisi ke-64 pada tahun 2020. Kenaikan signifikan pada 2021 terjadi pada indikator 'fungsi pemerintahan' yang skornya naik dari 7,17 menjadi 7,86. Indikator 'partisipasi politik' naik dari 6,11 menjadi 7,22 dan 'kebebasan sipil' naik dari 5,59 menjadi 6,18. Indikator 'pemilu dan pluralism' tidak mengalami perubahan skor, yaitu di angka 7,92. Sementara itu, 'budaya politik' mengalami proses sebaliknya, skornya turun dari 5,63 menjadi 4,38.¹

Kendati mengalami kenaikan, Indonesia tetap dipandang sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Menurut EIU, secara umum negara dengan demokrasi cacat sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar. Negara dalam kelompok 'cacat' ini masih memiliki masalah fundamental, seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti-kritik, partisipasi politik warga yang lemah, dan kinerja pemerintah yang belum optimal.²

Sepanjang tahun 2021 INFID secara umum mencoba ikut serta dalam memajukan kehidupan demokrasi dengan mencari solusi bagi masalah fundamental seperti yang disebutkan di atas. Melalui program yang ditawarkan, INFID berusaha dengan keras meningkatkan partisipasi politik warga sekaligus kinerja pemerintah, terutama dalam penyediaan layanan publik yang lebih berpihak kepada kelompok rentan. Secara tidak langsung, melalui aktivitas riset, baik kuantitatif maupun kualitatif, dialog multipihak, kerja advokasi, kampanye dan media yang seluruhnya berbasis bukti, INFID ikut menumbuhkan budaya politik yang terbuka terhadap kritik.

¹ <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4194/kehidupan-demokrasi-indonesia-2021-mengalami-kemajuan#:~:text=Sejakpersen202006persen2Cpersen20indekspersen20demokrasipersen20Indonesia,menjadipersen206persen2C71persen20padapersen202021>.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>

Peran dan Kontribusi INFID

Dalam konteks Bisnis dan HAM, pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk perbaikan. Isu Bisnis dan HAM sudah diintegrasikan dalam 4 (empat) sasaran utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 dan 2020-2024. Selain itu, pemerintah juga telah menyusun Peta Jalan Bisnis dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 menuju Bisnis yang Bertanggung Jawab.

Korporasi menduduki peringkat kedua sebagai pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM. Sepanjang 2019 sampai dengan September 2021, Komnas HAM RI telah menerima 1.366 pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi. Jumlah kasus cenderung stabil dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019 sebanyak 435 berkas, tahun 2020 sebanyak 455 berkas, dan 2021 sebanyak 428 berkas. Isi pengaduan berkaitan dengan agraria, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup dengan hak yang dilanggar adalah hak atas kepemilikan tanah, hak atas kesejahteraan, dan hak hidup.

Isu di atas tidak lepas dari perhatian INFID. Salah satu tantangan besar dalam pemajuan HAM adalah lemahnya kesadaran para pemangku kepentingan, terutama pelaku bisnis, tentang HAM. Atas alasan inilah peningkatan kesadaran publik adalah salah satu strategi yang ditempuh INFID demi kemajuan HAM di dunia bisnis. INFID menyelenggarakan seri webinar tentang Bisnis dan HAM. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan 1) Mempromosikan pentingnya pengintegrasian isu pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim di dalam kerangka nasional bisnis dan HAM, 2) Menarik perhatian pemerintah dan publik terkait isu bisnis dan HAM, dan 3) Mengidentifikasi rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam mengimplementasikan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs on BHRs) di Indonesia.

UNGPs on BHR adalah seperangkat pedoman bagi negara dan perusahaan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM yang dilakukan dalam operasi bisnis. Pedoman ini mempunyai tiga pilar utama. Pertama, pemerintah wajib melindungi hak asasi setiap warga. Kedua, perusahaan wajib menghormati HAM serta mencegah dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam menjalankan bisnis. Ketiga, pemenuhan

hak pemulihan korban pelanggaran HAM adalah tugas negara dan perusahaan.

Webinar memberikan ruang bagi diskusi antara tiga atau empat narasumber dan peserta selama dua hingga tiga jam dipandu oleh seorang moderator dengan format daring. Jumlah peserta di setiap seri webinar berkisar 50-100 orang. Peserta memiliki berbagai latar belakang dari pemerintah, OMS, akademisi, jurnalis, dan publik. Mereka hadir secara langsung dan/atau menonton tayangan ulang di kanal Youtube INFID.

Peningkatan kesadaran publik juga dilakukan melalui media sosial yang populer di kalangan masyarakat. Kampanye dikerjakan bersama penggiat kampanye di media sosial. Konten media sosial berupa artikel dan *e-poster* diunggah ke akun Instagram dan Twitter INFID setelah melewati proses kurasi internal. Terdapat tujuh belas konten yang sudah disebar melalui media sosial berkaitan dengan isu bisnis dan HAM pada tahun 2021. Ketujuh belas konten tersebut secara total telah dilihat dan dibaca 28.445 kali oleh publik per tanggal 14 Maret 2022.

Kerjakampanye dilengkapi dengan kerja lain yang menyoal pada perubahan di lingkungan kebijakan. Selain pengarusutamaan isu pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim dalam konteks bisnis dan HAM, kerja advokasi juga memberikan fokus pada upaya untuk mengintegrasikan kedua isu tersebut di dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk dapat mengarusutamakan HAM dalam bisnis, yaitu mengintegrasikan isu bisnis dan HAM ke dalam pembahasan 4 (empat) kelompok rentan pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019 dan 2020-2024. Selain itu, pemerintah menyiapkan Peta Jalan Bisnis dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 menuju Bisnis yang Bertanggung Jawab.

Sebagai langkah awal, INFID menyiapkan kertas kebijakan sebagai dasar kerja advokasi. Kertas kebijakan bisnis dan HAM dikembangkan berdasarkan kajian meja atas 100 beragam dokumen, berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang dikeluarkan oleh PBB, otoritas pemerintah pusat maupun daerah, lembaga independen di baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kertas kebijakan yang menyoar tiga aktor, yaitu pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil memuat tiga komponen penting, yaitu 1) Masukan tentang bisnis dan HAM dengan penekanan pada aspek pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim, 2) Dorongan agar pemerintah dapat menyinergikan dan mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim dan prinsip pemberdayaan perempuan dalam mengimplementasikan UNGPs on BHRs, dan 3) Dorongan agar pelaku bisnis dapat melaksanakan kegiatannya dengan memperhatikan prinsip pemberdayaan perempuan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Kertas kebijakan diluncurkan dengan mengundang perwakilan para pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis dan HAM di Indonesia. Mereka hadir dan menjalankan peran, baik sebagai penanggap atas kertas kebijakan maupun peserta.

Bekerja sama dengan Elsam, salah satu organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang Bisnis dan HAM, INFID menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus tingkat tinggi untuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Diskusi diadakan dengan tujuan sebagai berikut, 1) Bertukar informasi kerja masyarakat sipil dalam isu bisnis dan HAM, 2) Memperkuat forum diskusi masyarakat sipil dalam konteks advokasi Bisnis dan HAM, 3) Menyusun kerangka peluang kolaborasi dalam konteks isu bisnis dan HAM, 4) Memperluas jaringan masyarakat sipil dalam konteks advokasi bisnis dan HAM.

Diskusi kelompok terfokus telah menghasilkan terbentuknya tiga kelompok kerja, yaitu 1) Advokasi Kebijakan. Kelompok kerja ini bertanggung jawab melakukan advokasi kebijakan atau pembentukan hukum agar prinsip Bisnis dan HAM masuk ke dalam produk hukum nasional atau mengupayakan melalui RANHAM atau Stranas, 2) Kerja sama berbasis Multipihak. Kelompok kerja ini bertanggung jawab untuk membangun proses diskusi multipihak dengan tujuan mendorong perilaku korporasi agar korporasi memenuhi kepentingan korban atau aspek-aspek HAM dalam konteks kebijakan dan menyediakan ruang pemulihan bagi pekerja, dan 3) Hak korban. Kelompok kerja ini bertanggung jawab dalam pendampingan dan pengorganisasian korban. Selain tiga kelompok kerja tersebut, kegiatan ini menghasilkan beberapa rencana kerja untuk advokasi bisnis dan HAM.

Salah satu rekomendasi terpenting yang muncul dalam diskusi kelompok

terfokus ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang terlibat dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) di Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, telah membentuk gugus tugas ini. Ada 20 kementerian/lembaga pemerintah dan tujuh lembaga non-pemerintah yang masuk di dalamnya. Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.HA.01.07 Tahun 2021, gugus tugas ini memiliki mandat untuk mengoordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM di tingkat nasional. INFID dipilih menjadi salah satu mitra non-pemerintah di dalamnya.

Penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) merupakan salah satu agenda utama GTN BHAM. Penyusunan dokumen strategi ini melibatkan pemangku kepentingan terkait, yakni pemerintah, pelaku usaha atau sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Berangkat dari hasil diskusi, perwakilan ketiga pemangku kepentingan ini sepakat draf Stranas BHAM berfokus pada tiga strategi. Pertama, peningkatan kapasitas sebagai jawaban atas masih lemahnya pemahaman isu bisnis dan HAM di kalangan pemangku kepentingan. Kedua, harmonisasi dan penyelarasan regulasi serta kebijakan terkait bisnis dan HAM. Ketiga, mendorong akses pemulihan terhadap korban dugaan pelanggaran akibat aktivitas atau operasional bisnis. INFID menjadi mitra non-pemerintah yang mendapatkan kepercayaan dari gugus tugas untuk menangani harmonisasi dan penyelarasan regulasi dan kebijakan berkaitan dengan bisnis dan HAM.

Selain perubahan yang diharapkan terjadi di sektor bisnis, INFID melakukan upaya memajukan demokrasi dan HAM di kalangan pemerintah, secara spesifik pemerintah kota dan kabupaten, lewat program kabupaten/kota HAM. Program ini bertujuan untuk mengarusutamakan kabupaten/kota HAM di Indonesia dan memastikan praktik pemerintahan di daerah berasaskan pada HAM.

Pertama, pelatihan kabupaten/kota HAM dilakukan bersama dua pemerintah kota, yaitu Pemerintah Kota Bogor dan Semarang. Pelatihan di Bogor dilakukan INFID bersama IMPARSIAL. Pelatihan bertujuan untuk 1) Meningkatkan kapasitas pemahaman tentang HAM bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dan kelompok masyarakat sipil, 2) Merumuskan rencana aksi strategis dalam mewujudkan Bogor sebagai Kota HAM, khususnya dalam konteks penguatan toleransi, 3) Memperkuat sinergi antara pemerintah

dengan kelompok masyarakat sipil di Kota Bogor. Pelatihan kabupaten/kota HAM di Bogor dihadiri 41 peserta perwakilan dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sepuluh kelompok masyarakat sipil. Secara spesifik, pelatihan ini memberikan fokus pada pembahasan toleransi di Bogor sekaligus menindaklanjuti masuknya Indeks Kerukunan Umat Beragama dalam RPJMD Kota Bogor 2019 – 2024. Terdapat dua belas narasumber berasal dari dalam dan luar negeri yang berperan sebagai perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan.

Selain Bogor, INFID juga mengadakan pelatihan di Semarang bekerja sama dengan Komnas HAM RI dan Pemerintah Kota Semarang. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama yang menetapkan Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021. Lebih jauh, pelatihan ini dimaksudkan sebagai upaya memastikan langkah yang berkelanjutan dan berkomitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk terus menjunjung prinsip HAM dalam penyelenggaraan negara. Pelatihan kabupaten/kota HAM di Kota Semarang dilaksanakan secara daring. Pelatihan ini dihadiri oleh 22 laki-laki dan 14 perempuan yang mewakili 26 OPD Pemerintah Kota Semarang dan sepuluh organisasi masyarakat sipil lokal.

Pelatihan dibagi menjadi tujuh kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung selama tiga-empat jam dan mencakup satu-dua sesi pelatihan. Selama pelatihan, sesi disusun sesuai dengan kebutuhan peserta. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman HAM bagi ASN dan kelompok masyarakat sipil Kota Semarang. Pelatihan juga menjadi ruang bagi proses terjalinnya sinergi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil dan perumusan bersama rencana aksi strategis dari kedua pihak dalam mewujudkan Semarang sebagai Kota HAM.

Kedua, selain pelatihan, pada tahun 2021 INFID menyelesaikan penulisan dua buku berkaitan dengan kabupaten/kota HAM di Indonesia. Buku pertama berjudul *Human Rights Cities in Indonesia*. Buku ini membahas lima hal, yaitu 1) Contoh baik pengadopsian kabupaten/kota HAM, 2) Praktik kabupaten/kota HAM di Indonesia dan dunia, 3) Gerakan kabupaten/kota HAM di Indonesia dibandingkan dengan gerakan yang sama di kota lain di dunia, 4) Kerangka konseptual kabupaten/kota HAM, dan 5) Analisis dan rekomendasi bagi pengadopsian kabupaten/kota HAM di Indonesia yang didedikasikan secara khusus bagi Kabupaten Jember, Wonosobo,

Bojonegoro, dan Kota Palu.

Buku lain yang ditulis oleh INFID berjudul *Kajian Indikator Kabupaten/Kota HAM: Studi Praktik Penyelenggaraan Kota HAM di Dunia dan Indonesia*. Buku ini menyediakan materi tentang prinsip dan indikator kabupaten/kota HAM untuk penyusunan rencana pembentukan kota/kabupaten HAM. Buku ini menawarkan alat untuk melakukan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi. Hasil kajian dan rekomendasi dalam buku ini diharapkan menjadi bahan yang memadai bagi para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, bagi para aktivis HAM, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan memahami lebih jauh tentang kabupaten/kota HAM.

Ketiga, INFID bekerja sama dengan Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Pemerintah Kota Semarang mengadakan Festival HAM 2021 dengan tema “Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi, dan Resiliensi.” Festival ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan INFID sejak tahun 2014. Festival HAM, sebelumnya bernama Konferensi Kabupaten/Kota HAM, bertujuan sebagai forum berbagi pengalaman keberhasilan pemerintah daerah dalam mempraktikkan pembangunan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan unsur budaya lokal. Melalui forum tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan inisiatif baik berkaitan dengan kabupaten/kota HAM, meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan, dan mencari strategi penyelesaian masalah HAM di tingkat lokal.

Pemilihan Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021 merupakan hasil proses seleksi dan pertimbangan yang dibuat INFID, Komnas HAM RI, dan KSP yang menjadi panitia inti. Pemerintah Kota Semarang dinilai telah banyak mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kebijakan dan program pembangunan. Sebagai langkah persiapan, INFID, Komnas HAM RI, dan KSP bersama dengan Pemerintah Kota Semarang melakukan serangkaian kegiatan hingga menjelang hari-H kegiatan Festival HAM 2021.

Dalam rangka Festival HAM 2021 dan meningkatkan peran anak muda, dirasa perlu untuk membangun efektivitas suatu program yang dapat melibatkan anak muda secara bermakna dengan melibatkan mereka sebagai subjek. Maka dari itu, dengan semangat bergerak bersama sekaligus sebagai rangkaian tahunan kegiatan Festival HAM 2021, INFID mengadakan

kegiatan untuk anak muda. Semangat kegiatan ini adalah sebagai bagian memastikan kelompok anak muda mendapatkan wadah dan kesempatan belajar bersama dengan para pemangku kepentingan di dalam forum yang berusaha mendorong implementasi HAM. Forum atau kegiatan ini disebut Youth Fellowship 2021.



Berdasarkan proses seleksi, terdapat 10 anak muda terpilih untuk mengikuti Youth Fellowship 2021. Anak muda ini terdiri dari 4 perempuan dan 6 laki-laki yang berasal dari kabupaten/kota di Indonesia . Anak muda yang terpilih menjadi peserta Youth Fellowship 2021 mendapatkan pelatihan sebelum kegiatan Festival HAM 2021 berlangsung . Pelatihan ini dilakukan selama dua hari secara *online* dengan tujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi kaum muda untuk berbagi dan belajar tentang isu HAM dan pembangunan terbaru.

Selain pelatihan, pada hari-H Festival HAM 2021, para peserta diberikan kesempatan mengikuti forum-forum diskusi dan berkesempatan mengutarakan pendapat serta berdiskusi secara langsung dengan pemangku kebijakan dalam salah satu sesi konferensi. Setelah masukan mereka didiskusikan dan disampaikan dalam forum konferensi, salah satu

anak muda diberikan kesempatan menyampaikan Deklarasi Anak Muda di dalam Penutupan Festival HAM 2021. Dengan begitu, hasil diskusi bersama dapat didengarkan dan dapat menjadi catatan para pemangku kepentingan yang hadir dalam Festival HAM 2021.

Dalam upaya memastikan Festival HAM, bisa diketahui dan diakses oleh seluruh kalangan, termasuk anak muda dilaksanakan kegiatan *Roadshow to University* Festival HAM 2021. Kegiatan ini bertujuan menyebarkan informasi mengenai Festival HAM dan pemahaman terhadap konsep Kegiatan *Roadshow to University* pertama dilaksanakan bersama UNIKA Soegijapranata dengan dihadiri oleh 70 orang (38 laki-laki dan 32 perempuan). Tema diskusinya adalah "Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM: Toleransi Beragama dan Berkeyakinan". Dalam diskusi, hadir sebagai pembicara Benny Danang Setianto, dosen Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata; Abdul Waidl, Senior Program Officer HAM & Demokrasi INFID; Riri Khariroh, Direktur Eksekutif AIDA; dan Mugiyanto, Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden. Forum diskusi membahas peran pemda dan dukungan pemerintah pusat dalam mendorong toleransi beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Kegiatan *Roadshow to University* selanjutnya dilaksanakan bersama Universitas Jenderal Soedirman. Kegiatan ini dengan dihadiri oleh 72 orang (30 laki-laki dan 42 perempuan) dengan tema diskusi "Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM: Memastikan Keadilan dalam Pandemi". Dalam diskusi kedua membahas cara HAM dapat mendorong pembangunan daerah yang adil, khususnya dalam masa pandemi dan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan hal tersebut. Hadir sebagai pembicara Manunggal Kusuma Wardaya, dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman membahas sudah sejauh mana HAM diimplementasikan dalam penanganan selama masa pandemi; Bona Tua, Senior Program Officer SDGs INFID membahas tentang keadaan Indonesia dalam masa pandemi; dan pembicara terakhir, Sri Rahayu, Penyuluh Komnas HAM membahas peran penting pemda dalam mendorong pembangunan daerah yang adil berbasis HAM.

Guna memastikan media ingat dengan kegiatan Festival HAM 2021, pada 9 November 2021 INFID mengadakan Media Briefing yang menghadirkan empat panitia inti Festival HAM 2021. Pembicara yang hadir yaitu Sugeng

Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID); Abdul Waidl (Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID); Yuli Asmini (Penyuluh Komnas HAM); dan Sunarman Sukamto (Tenaga Ahli Madya Kedepujian V KSP).

Keempat, pengalaman dalam mempromosikan kabupaten/kota HAM dibagikan ke ruang lingkup kerja lain. INFID berpartisipasi dan mengusung tema “Kabupaten/Kota HAM di Masa Pandemi: Peran Pemerintah Daerah dalam Memajukan Pemulihan Pandemi” pada salah satu sesi dalam kegiatan Open Government Week 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang); Chusnunia Chalim (Wakil Gubernur Lampung); Aldhiana Kusumawati (Desk Wonosobo Ramah HAM); Mugiyanto (Tenaga Ahli Madya Kedepujian V Kantor Staf Presiden); Zainal Abidin (Peneliti Hukum dan HAM). Acara yang dipandu Yuli Asmini (Penyuluh Komnas HAM) dihadiri 112 peserta, terdiri dari 60 orang perempuan dan 52 orang laki-laki, dengan berbagai berlatar belakang.

Di tingkat internasional, pengalaman yang sama dibagikan dalam forum tahunan lainnya yang diadakan sejak tahun 2011 oleh Kota Gwangju, Korea Selatan, yaitu World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2021. Secara rutin, dalam kegiatan ini INFID mengikuti kegiatan dan sekaligus berperan sebagai salah satu pihak penyelenggara. Melalui sesi khusus yang diberikan kepada Indonesia, INFID dan Komnas HAM RI menunjukkan praktik-praktik baik kabupaten/kota HAM di Indonesia kepada dunia internasional. Tema yang diangkat adalah *“Human Rights Cities in Indonesia: Human Rights Cities as a Strategy and Practice to Promote Tolerance and Freedom of Religion and Belief across Indonesia.”*

Acara ini diisi dengan presentasi Halili Hasan (Direktur Riset SETARA Institute); Abdul Haris (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Bakesbangpol Kota Semarang); Aldhiana Kusumawati (Desk HAM Wonosobo); dan Jaime Puigpinos (UCLG CSIPDHR). Sesi yang diikuti oleh 42 orang peserta ini, terdiri dari 20 laki-laki dan 22 perempuan, membahas tentang praktik kabupaten/kota HAM yang dapat menjadi contoh yang menjanjikan dalam memperkuat toleransi dan keberagaman.

Isu yang tidak kalah penting terkait dengan pemajuan demokrasi dan HAM adalah penanganan paham dan praktik yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan yang dianut Indonesia. Pada periode sebelumnya, kedua hal

inimenguat di kalangan masyarakat sebagai bagian dari pengaruh di tingkat global. Eksperimen ISIS untuk mendirikan kekhalifahan di era modern sudah berantakan, tetapi paham ekstremisme tidak serta-merta hilang dengan sendirinya.



Dalam laporan yang dirilis *International Center for the Study of Radicalization* (ICSR) pada 2018, sekitar 41.490 warga internasional dari 80 negara telah bergabung dengan ISIS.³ Sebanyak 13 persen di antara mereka adalah perempuan, dan 12 persen adalah kelompok rentan, termasuk anak-anak dan bayi. Hingga 2018, tercatat sedikitnya 7.366 orang telah kembali ke negara asal. Menyusul kekalahan ISIS pada tahun 2017, gelombang warga internasional dipulangkan ke negara asal masing-masing atau dikirim ke negara-negara dunia ketiga. Asia Tenggara telah mendeportasi perempuan dan anak-anak dalam jumlah terbesar.

Civil Society against Violent-Extremism (C-Save) memperkirakan sekitar 250 WNI ditahan dan dideportasi dari negara transit pada tahun lalu. Setidaknya 75 persen dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.⁴ Berdasarkan laporan mereka, *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) mensinyalir beberapa deportan dan returni berpotensi melakukan tindakan terorisme

³ Cook, Joana and Vale, Gina. "From Daesh to 'Diaspora:' Tracing the Women and Minors in the Islamic State," 2018, Hal. 3

⁴ CSave, "Panduan Deteksi dan Penanganan Dini Ekstremisme Kekerasan Tingkat Desa", 2018, hal. 2

dan meradikalisasi orang lain.⁵ Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab. Kendati sudah pernah masuk program deradikalisasi, pasangan suami-istri Indonesia deportan dari Turki kemudian bergerak ke Malaysia untuk kembali berhubungan dengan ISIS. Selanjutnya, mereka berpindah ke Filipina dan menjadi pelaku bom bunuh diri, Mindanao. Atas alasan inilah INFID mencoba memberikan sumbangan untuk mengurangi risiko kembalinya ideologi yang intoleran agar bermanifestasi kembali.

Ada empat proyek yang dikerjakan INFID pada tahun 2021 dan diharapkan memberikan sumbangan pada perbaikan pencegahan ekstremisme berkekerasan. **HARMONI**. Proyek ini berjudul "Meningkatkan Sistem Reintegrasi untuk Penanganan dan Pendampingan Deportan dan/Returni Perempuan dan Anak Korban Radikalisme di Kota Bandung dan Surabaya" bagi pemerintah daerah, ormas keagamaan, Organisasi Masyarakat Sipil(OMS). Proyek berdurasi satu tahun yang berakhir pada pertengahan tahun 2021 adalah kelanjutan dari proyek yang dimulai pada tahun 2020.

Proyek ini secara khusus menangani para deportan dan returni perempuan dan anak sebagai korban gerakan radikalisme global yang dipelopori ISIS. Keputusan perempuan dan anak bergabung dalam jaringan kelompok radikal bukan keputusan individual yang bebas. Mereka terjerumus dalam gerakan radikal karena adanya relasi dan hierarki gender yang timpang serta doktrin kepatuhan yang melemahkan posisi tawar perempuan di tengah budaya maskulin yang ada dalam lingkaran jaringan kelompok radikal.

INFID melihat pentingnya penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dan menjadikan sebagai pintu masuk bagi penyusunan kebijakan. Hingga saat ini belum ada satu pun peraturan yang khusus mengatur tentang penanganan deportan dan returni perempuan dan anak, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Di dalam proyek ini, INFID bermitra dengan PW Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur. Melengkapi aktivitas yang dilakukan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2021 INFID menyelenggarakan empat kegiatan utama, yaitu pelatihan, pertemuan forum multistakeholder, penyusunan makalah kebijakan, evaluasi dan refleksi program, dan pertemuan nasional.

⁵ IPAC, "Managing Indonesia's Pro-ISIS Deportees," 2018, hal. 12

Pelatihan bagi OPD, OMS, dan ormas keagamaan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan di Jawa Timur. Pelatihan di Jawa Timur berlangsung di Surabaya. Pelatihan di Jawa Barat berlangsung di Bandung. Pelatihan dilaksanakan secara *hybrid* dan dihadiri 30 peserta dari masing-masing wilayah. Fasilitator hadir secara luring, sementara para narasumber hadir secara daring. Salah satu hasil pelatihan, para pemangku kepentingan di kedua di wilayah telah menyusun kelompok kerja penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak yang terpapar paham radikal terorisme dengan melibatkan OMS dan ormas keagamaan.

Pascapelatihan, kelompok kerja ini melakukan advokasi dan menyampaikan pesan kepada gubernur/kepala daerah melalui Bakesbangpol di masing-masing provinsi agar mereka dapat dimasukkan di dalam Tim Koordinasi Pencegahan Terorisme, Radikalisme, dan Separatisme yang tertuang di dalam Keputusan Gubernur, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur.

WhatsApp Grup (WAG) Multi-stakeholder yang terbentuk sejak tahun 2020 tetap aktif melakukan diskusi di tahun 2021. WAG di Jawa Barat beranggotakan 62 orang (37 perempuan, 25 laki-laki): dari pemerintah daerah 29, ormas 16, OMS 17. Sementara di Jawa Timur: 48 peserta (36 perempuan, 12 laki-laki): dari pemerintah daerah 13, ormas keagamaan 14, OMS 21. WAG berkembang menjadi media *peer learning*. Anggota kelompok aktif membahas dan memperbarui pemahaman anggotanya atas berbagai macam isu berkaitan dengan deportan dan returni perempuan dan anak.

Dalam rangka peningkatan kesadaran publik, INFID maupun PW Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur menyelenggarakan seri webinar. Dalam satu webinar, returni dihadirkan untuk berbagi pengalaman keterlibatan mereka dalam ISIS dan alasan mereka memilih kembali ke Indonesia. Webinar lain membahas posisi perempuan dan anak dalam radikal-terorisme. Webinar terakhir berlangsung bertepatan dengan perayaan Hari Kartini. Dalam webinar ini INFID meluncurkan buku panduan teknis penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak bagi OPD, OMS, dan ormas keagamaan. KSP dan BNPT memberikan tanggapan positif atas penerbitan dan publikasi buku panduan ini.

Dalam rangka kepentingan advokasi kebijakan, dengan bekerja sama dengan PW Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur, INFID

menyusun dua kertas kebijakan, yaitu “Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Radikal Terorisme di Jawa Barat dan di Jawa Timur”. Kertas kebijakan ini berisi daftar kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan penanganan dan pendampingan deportasi dan returni eks ISIS disertai analisis efektivitas kebijakan dan dikaitkan dengan pengalaman segar yang mereka dapatkan saat melakukan penanganan dan pendampingan deportasi dan returni. Dalam kertas kebijakan ini, disediakan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah. Kedua kertas kebijakan tersebut telah disampaikan kepada para pengambil kebijakan melalui forum temu nasional.

Ada tambahan beberapa aktivitas yang merupakan kerja kolaborasi antara INFID dengan PW Fatayat NU Jawa Barat dan Jawa Timur, seperti kegiatan peluncuran buku panduan yang dilakukan secara daring, lokakarya evaluasi dan refleksi program yang dilakukan secara luring, serta lokakarya konsultasinasional untuk membahas hasil evaluasi dan refleksi serta menyusun tindak lanjut proyek.

PREVENT. Proyek ini berjudul “Mempromosikan Toleransi, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia untuk Pencegahan Kekerasan Ekstremisme.” INFID berupaya memberdayakan guru agama, generasi muda, dan pemerintah daerah untuk mempromosikan toleransi, keberagaman, dan kebebasan beragama. INFID juga bermaksud memperkuat pembelajaran dan kerja sama antarorganisasi di Indonesia dan institusi keagamaan di berbagai negara untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi.

INFID memandang bahwa agenda untuk mendorong toleransi di semua institusi utama masyarakat seperti pendidikan, tempat kerja, tempat tinggal, dan ruang media sosial masih menghadapi banyak kendala, baik berkaitan dengan dengan konsolidasi negara maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, di awal tahun 2021 INFID menyelenggarakan Focus Group Discussion “Memikirkan Strategi Penguatan Toleransi dan Kebinekaan Pasca-pelarangan FPI” sebagai bagian dari upaya menemukan cara kemitraan dan kolaborasi serta sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, untuk terus mendorong toleransi agar semakin baik prospeknya. FGD dihadiri 20 peserta (9 perempuan dan 11 laki-laki) yang terdiri dari 15 hadir luring dan 5 daring. Peserta yang hadir antara lain dari Maarif Institute, Islami.co, YayasanAIDA, Setara Institute, P3M, UMJ, IBTimes.ID, Jaringan Gusdurian, dan LIPI.

Diskusi ini menghasilkan rekomendasi secara umum, yaitu 1) Peningkatan intensitas kuantitas dan kualitas dialog antaragama dan kepercayaan, 2) Menentukan tujuan bersama RAN PE dalam setiap Ormas, OMS, K/L, parpol. Secara rinci menghasilkan rekomendasi bagi internal, ormas, OMS, parpol, K/L, pemda, media sosial dan media konvensional, dan pendidikan formal.

Pada periode bulan Agustus - November 2020 INFID bekerja sama dengan Jaringan Gusdurian melakukan survei "Persepsi dan Sikap Generasi Muda terhadap Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan" di enam kota besar (Surabaya, Surakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Pontianak). Tujuan survei untuk mendapatkan data termutakhir mengenai persepsi dan sikap generasi muda terhadap radikalisme dan ekstremisme-kekerasan yang pernah diriset INFID pada tahun 2016, analisis fenomena terkini, perubahan dan dinamika yang terjadi sejak 2016 sampai 2020, dan mendapatkan rekomendasi kebijakan dan program untuk pemerintah dan masyarakat sipil. Secara umum, temuan survei menunjukkan adanya pergeseran positif pada sikap dan pandangan generasi muda terhadap isu intoleransi dan ekstremisme berbasis agama jika dibandingkan dengan temuan survei pada tahun 2016.

Pada awal tahun 2021, INFID menyelenggarakan media *gathering* untuk menyampaikan hasil survei. Hasil laporan survei disampaikan langsung oleh koordinator survei, yaitu Ahmad Zainul Hamdi (dosen UIN Sunan Ampel Surabaya). Moderator media *gathering* adalah Kalis Mardiasih, aktivis HAM dan kesetaraan gender. Ada 4 (empat) narasumber yang memberikan tanggapan atas hasil survei, yaitu Dr. Ninik Rahayu, S.H, M.S., tenaga profesional Lemhannas RI mengaitkan hasil survei dengan SKB 3 menteri soal seragam sekolah; Prof. Dr. Muhammad AS Hikam, pengamat politik dan penasihat INFID, menyampaikan bahwa persoalan menguatnya ancaman terorisme kepada kelompok muda di Indonesia saat ini bukan lagi berkaitan dengan masalah ideologi; Ika Ningtyas, Sekjen Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), menyebut bahwa berkaitan dengan kekerasan berbasis agama dan intoleransi pada generasi muda, media memiliki peran menangkal mis/disinformasi berkonten agama; dan Suraji Sukamzawi, Program Manager Jaringan Gusdurian, menyampaikan bahwa berkaitan dengan temuan adanya gap antara toleransi dalam konteks normatif dengan aktual sangat lebar. Hasil survei dapat diasumsikan bahwa baik institusi negara maupun

warga masyarakat kurang menyiapkan modalitas dalam membangun pengetahuan dan sikap toleran dan menghargai keberagaman. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini cukup tinggi. Acara dihadiri 100 orang (54 perempuan dan 64 laki-laki) melalui Zoom, 120 orang melalui YouTube, 46 orang melalui Facebook, dan 440 melalui Twitter.

Ada tiga kegiatan riset, satu riset kuantitatif dan dua riset kualitatif yang dilakukan INFID untuk dijadikan landasan bagi kegiatan selanjutnya. Riset pertama adalah survei warga tentang sikap atas toleransi, keberagaman, dan kebebasan beragama. Survei warga dikerjakan bersama Lembaga Demografi Universitas Indonesia dengan judul “Sikap Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap Toleransi, Kebinekaan dan Kebebasan Beragama di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan di 10 provinsi, mencakup 36 kota dengan total 1200 responden. Pemilihan provinsi merujuk pada 10 provinsi dengan peristiwa pelanggaran kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) terbanyak pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Setara Institute pada 2021. Selain itu, 10 provinsi penelitian merupakan wilayah yang banyak mengalami konflik dan sebagai provinsi dengan kelompok Muslim sebagai minoritas. Riset ini diharapkan dapat diselesaikan pada awal tahun 2022 dan selanjutnya dipublikasikan.

Riset berikutnya, yaitu penelitian kualitatif tentang tren radikalisme dikerjakan bersama peneliti BRIN. Penelitian kualitatif pertama dengan judul “Ekstremisme dan Intoleransi dalam Beragama: Studi Kasus Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah dan Nasional”. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan dan melihat lebih jauh tren perkembangan peraturan perundang-undangan intoleran dan diskriminatif di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah selama rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020). Riset masih dalam proses penyelesaian dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2022.

Penelitian kualitatif kedua berjudul “Aktivisme Islam di Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi: Studi Kasus di SMAN 51 Jakarta, SMAN 31 Jakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Telkom University”. Riset kualitatif ini bertujuan mengkaji perkembangan terakhir aktivisme Islam di SMA dan perguruan tinggi umum di Indonesia. Riset dilakukan di dua SMA dan dua perguruan tinggi umum, yaitu SMAN 51 Jakarta, SMAN 31 Jakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Telkom University. Riset

menggunakan pendekatan kualitatif dalam penggalian dan pemilahan data. Para narasumber dipilih secara sengaja untuk diwawancarai dengan mempertimbangkan posisi dan peran mereka dalam kegiatan aktivisme Islam di lingkungannya masing-masing. Terdapat 45 orang narasumber yang telah diwawancarai. Riset diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2022.

Sebagai salah satu langkah konkret keberlanjutan hasil riset, INFID bekerja sama dengan empat media, yaitu NU Online, IBTimes.ID, Islami.co, dan Arrahim.id untuk mengembangkan hasil temuan dan rekomendasi riset menjadi material kampanye dan dikemas dalam bentuk yang lebih populer dan ringan untuk menjangkau publik secara lebih luas. Dalam kerangkakerja sama kampanye daring ini, INFID bersama empat media, yaitu IBTimes.ID, Islami.co, NU Online, dan Arrahim.id, telah memublikasikan konten sebanyak 61 artikel, 17 video, 19 infografis, dan 2 podcast melalui berbagai kanal, seperti website, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, dan Facebook. Sejauh ini total *reach* sudah mencapai 293.881 *views*, 98.192 total *reach/impression*, *likes* sebanyak 8.383 dan 1.556 *engagement/comment*.

INFID bekerja sama dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam upaya mendorong implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, dengan mengembangkan modul "Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI". Modul ini telah dilatihkan kepada 61 guru (29 perempuan dan 32 laki-laki) dari 2 SMP dan 46 SMA/SMK yang berasal dari Solo Raya dan Jabodetabek.

Dalam kerangka memperkuat demokrasi dan toleransi, INFID bersama dengan Yayasan LKiS Yogyakarta mengembangkan modul Sekolah Demokrasi Online. Bulan September sampai November 2021 telah diselenggarakan sebanyak dua kali dan melatih 62 orang (28 perempuan dan 34 laki-laki) perwakilan pemerintah, OMS/ormas, dan kelompok minoritas dari 11 kabupaten/kota. Tujuan Sekolah Demokrasi Online untuk memperluas dan memajukan kabupaten/kota HAM dan sebagai ruang untuk mendorong komitmen pimpinan pemerintah kabupaten/kota untuk memprioritaskan pencegahan ekstremisme-kekerasan (CVE), memperkuat kebinekaan, dan membangun kehidupan warga yang penuh toleransi.

Festival HAM 2021 yang diselenggarakan di Semarang kembali melibatkan

generasi muda melalui program Youth Fellowship 2021. Sebanyak 10 anak muda (4 perempuan dan 6 laki-laki) terpilih mendapatkan pengetahuan tentang HAM, SDGs, toleransi, keberagaman, kebebasan beragama, dan peluang pelibatan generasi muda dalam pembangunan yang berdasarkan prinsip HAM. Melalui *workshop* ini, peserta menghasilkan draf "Suara Perubahan Rekomendasi Pelibatan Anak Muda dalam Pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM" yang dibacakan dalam pembacaan deklarasi anak dan anak muda dalam penutupan Festival HAM 2021.

Membangun kerja sama internasional dalam memperkuat toleransi, perdamaian, dan demokrasi, INFID berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut serta mendorong Islam *rahmatan lil 'alamin* lebih luas ke berbagai negara dalam bentuk kegiatan seminar internasional yang bertajuk "Membangun Kerja Sama Internasional untuk Memperkuat Praktik Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* di Dunia". Seminar ini akan menjadi forum konsolidasi dan berbagi pengalaman dari keempat Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia (Asia Tenggara), Pakistan (Asia Selatan), dan Tunisia (Afrika Utara, Arab) dalam memperkuat pemahaman dan praktik Islam penuh rahmat bagi semesta sekaligus menjadi teladan bagi seluruh negara di dunia. Kegiatan ini didukung oleh Kedutaan Besar Indonesia di Pakistan, Malaysia, dan Tunisia.

PROTECT (*Preventing Violent Extremism through Promoting Tolerance and Respect for Diversity*). Proyek ini didesain untuk menyediakan bukti dalam upaya advokasi pencegahan ekstremisme berkekerasan (PVE) di Indonesia. Pada proyek ini, INFID menghasilkan dua laporan riset yang merupakan tindak lanjut dari dua riset yang pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019. Penelitian pertama adalah "Peran Organisasi Perempuan Berbasis Keagamaan dalam Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme Berkekerasan." Riset berkaitan dengan riset sebelumnya, yakni "Peran Organisasi Islam Moderat dalam Menangkal Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah".

Laporan riset menyediakan informasi tentang pengetahuan yang dimiliki sayap perempuan organisasi keagamaan dan organisasi lain mengenai transformasi kecenderungan dan sifat ekstremisme, dan posisi mereka dalam menanggapi ekstremisme berkekerasan. Riset berhasil merinci tantangan dan dukungan yang diterima oleh organisasi perempuan

berbasis keagamaan dan kebutuhan yang diharapkan dapat dibantu para pemangku pihak. Riset menyediakan pengetahuan tentang praktik baik dan pembelajaran konstruktif program pencegahan ekstremisme kekerasan. Dalam penelitian ditemukan bahwa Ormas Perempuan NU dan Muhammadiyah menunjukkan komitmen kuat memajukan moderasi keberagaman sebagai kunci keseimbangan antara kebinekaan dengan sikap toleran dalam kehidupan.

Riset kedua yang dihasilkan INFID adalah “Gerakan Ekstremisme di Sepuluh PTN Pasca-Perppu Ormas”. Pada tahun 2019, INFID melakukan penelitian di sepuluh perguruan tinggi negeri di enam provinsi di Indonesia. Temuan yang ada menunjukkan bahwa gejala radikalisme ditemukan di sepuluh perguruan tinggi negeri yang diteliti. Sebagai kerja lanjutan, laporan riset dapat memperlihatkan dampak Perppu No. 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas terhadap peta gerakan ekstremisme kekerasan di sepuluh PTN. Riset lanjutan menjadi penting karena menghasilkan data empirik yang dapat melandasi pembentukan kebijakan strategis kedepan untuk mempersempit ruang ekstremisme berkekerasan di perguruan tinggi secara keseluruhan.

Laporan riset merinci pergerakan kelompok intoleran terkini (ruang lingkup kegiatan, perubahan pola pergerakan, dan siapa kelompok sasaran baru perekrutan) di lingkungan perguruan tinggi negeri. Riset menawarkan analisis dan pengetahuan atas efektivitas tindakan yang diambil instansi pemerintah di sepuluh perguruan tinggi negeri. Terakhir, penelitian memberikan gambaran dukungan dan tanggapan dari organisasi keagamaan lainnya dan pemangku kepentingan yang dibutuhkan perguruan tinggi negeri dengan berlakunya peraturan pemerintah.

TANGGUH (Penguatan Efektivitas Peran Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penanganan Deportasi dan Returni). Proyek ini didesain untuk menyediakan alat yang andal, yaitu *Risk Assessment Tool* (RAT) dan *Need Assessment Tool* (NAT) untuk menangani deportasi dan returni, mencegah mereka kembali ke perilaku ekstremisme berkekerasan, dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.

Bekerja sama dengan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, INFID telah mengkaji RAT yang diadopsi oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan deportasi dan returni, yaitu 1) RAT untuk membuat

profil narapidana teroris secara umum (termasuk deportan dan returni) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Gunung Sindur, 2) RAT yang digunakan oleh Pusat Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PRSAMPK) "Handayani" untuk tujuan khusus menilai deportan dan returni, termasuk perempuan dan anak-anak, 3) RAT yang dikembangkan oleh Civil Society Against Violent Extremism (C-Save) bagi Kementerian Sosial untuk penilaian deportan dan returni, 4) RAT untuk identifikasi dan intervensi bagi narapidana teroris secara umum (termasuk deportan dan returni) di Pusat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Pusderad BNPT) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Sentul IIB, 5) RAT untuk profil terduga teroris secara umum (termasuk deportan dan returni) oleh Densus 88 Detasemen Khusus Penanggulangan Terorisme, dan 6) RAT untuk kepentingan pemberian bimbingan dan konseling kepada narapidana teroris pada umumnya (termasuk deportan dan returni) di Lembaga Pemasyarakatan Umum di seluruh Indonesia, oleh BNPT di bawah program deradikalisasi berbasis penjara.

Keterbukaan dari seluruh lembaga di atas membuat proses peninjauan atas RAT berjalan dengan lancar. RAT yang digunakan selama ini sudah berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan peruntukannya pun berbeda. Selain tidak cukup menangkap perkembangan yang begitu cepat, RAT masih memiliki sejumlah kekurangan. Tinjauan ini merupakan langkah awal untuk penanganan mereka secara efektif. Kekuatan dan kelemahan masing-masing alat dirinci dan dengan masing-masing rekomendasi untuk perbaikan. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki alat khusus untuk menilai deportan dan returni. Atas alasan inilah lembaga yang bertanggung jawab terpaksa menggunakan alat ukur yang diperuntukkan bagi penanganan narapidana terorisme. Padahal, deportan dan returni memiliki beragam karakteristik yang harus dipertimbangkan, seperti motif, gender, dan usia.

Selain itu, ada tiga faktor yang perlu dilihat dalam menilai deportan dan returni. *Pertama*, faktor kerentanan. Faktor ini meliputi berbagai variabel yang menggambarkan perbedaan sifat, kepribadian dan pembawaan seseorang secara internal yang telah terbukti terkait kuat dengan kecenderungan ekstremisme dan radikalisme. *Kedua*, faktor risiko. Ada berbagai variabel berkaitan dengan lingkungan sosial dan cara seseorang

menanggapi dengan keyakinan dan ideologi yang sudah terbentuk. *Ketiga*, faktor protektif. Faktor ini meliputi variabel-variabel yang bisa melindungi seseorang dari kecenderungan ekstremisme dan radikalisme, baik narasi ideologi maupun relasi (jejaring).

Finalisasi usulan RAT untuk penanganan deportan dan returni sudah melalui proses *peer review* yang menghadirkan pakar, yaitu 1) Ali Mashuri (Lektor Departemen Psikologi dan Departemen Magister Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Brawijaya), 2) Fajar Erikha (Prodi Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan Division for Applied Social Psychology Research/DASPR), 3) Nurul Arbiyah (Fakultas Psikologi Universitas Indonesia), dan Whinda Yustisia (Fakultas Psikologi Universitas Indonesia). Draf usulan RAT telah menjalani proses uji coba. Dalam kegiatan ini, terdapat 260 responden yang terdiri dari masyarakat umum dan kelompok masyarakat khusus, yaitu mantan napiter/deportan/returni dari 19 provinsi. Di antara 260 responden terdiri dari 70 laki-laki dan 190 perempuan dengan kelompok usia antara 15 sampai 54 tahun. Pendidikan terakhir dari responden 53 persen lulusan SMA/MA sederajat dan 38 persen lulusan S1. Dilihat dari sisi pekerjaan, 38 persen responden adalah pelajar, 30 persen belum memiliki pekerjaan, dan 15 persen karyawan swasta. Secara etnis, responden mewakili 15 etnis dan 1 (satu) kolom campuran yang terdiri dari berbagai etnis.

B. Program Penurunan Ketimpangan

Laporan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dilaksanakan di 33 provinsi, 160 kabupaten/kota memperlihatkan berbagai perbaikan. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan selama hidupnya menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 33,4 persen. Kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan pada 2021 sebesar 26,1 persen. Secara detail, sebanyak 13,8 persen perempuan usia 15-64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik pada 2021. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan 2016 (18,1 persen). Sama halnya dengan kekerasan fisik, prevalensi perempuan yang mengalami kekerasan seksual menunjukkan penurunan. Pada tahun 2016, proporsinya mencapai 24,2 persen, angkanya turun menjadi 18,7 persen pada 2021. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih banyak dialami oleh perempuan yang tinggal

di daerah perkotaan, yaitu 27,8 persen dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di daerah pedesaan (23,9 persen). Namun demikian, kedua angka tersebut turun dibandingkan tahun 2016, yaitu 36,3 persen di perkotaan dan 29,8 persen di pedesaan.⁶

Kendati mengalami perbaikan, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi pekerjaan besar. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 15,2 persen di antara kekerasan ini merupakan kekerasan seksual. Lebih memprihatinkan, 45,1 persen dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual.⁷

Masih maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021, menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah serius. Kekerasan seksual berasosiasi dengan ketimpangan gender di suatu wilayah. Berdasarkan Global Gender Gap Report 2021, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara. Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur GII di antaranya kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan tenaga kerja perempuan dibandingkan laki-laki. GII dianggap dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi sosial suatu wilayah yang pada akhirnya berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan.⁸

Pandemi memperluas ketidaksetaraan gender di seluruh Asia menjadi salah satu pokok bahasan Laporan Kesenjangan Gender Global 2021, yang melacak kemajuan menuju kesetaraan gender dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Pandemi mengakibatkan upaya dunia untuk mencapai kesetaraan gender mundur menjadi lebih lama, yaitu 135 tahun. Sebelum pandemi, diproyeksikan tujuan dapat dicapai dalam waktu 99 tahun. Perempuan mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan masuk kembali ke pekerjaan yang lebih lambat di tengah pandemi. Kesenjangan dalam peluang ekonomi antara pria dengan perempuan dapat semakin melebar, bahkan setelah pandemi, karena representasi perempuan

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/29/prevalensi-kekerasan-fisik-dan-seksual-terhadap-perempuan-menurun-pada-2021>

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/13/12391921/menteri-pppa-indonesia-peringkat-101-dari-156-dalam-hal-gender-gap?page=all>

tetap rendah di banyak “pekerjaan masa depan”, seperti komputasi awan dan teknik.⁹

Peran dan Kontribusi INFID

INFID melaksanakan proyek berjudul “CEPATSETARA: Percepatan Kesetaraan Gender di Indonesia melalui Pengesahan RUU Anti-Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Implementasi Amandemen UU Perkawinan 1974”. Proyek ini didesain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat nasional dan daerah dan mendorong perumus kebijakan untuk mengesahkan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan melaksanakan Amandemen UU Perkawinan 1974. Proyek dilaksanakan di tingkat nasional, yaitu di Jakarta dan lima daerah, meliputi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Kota Banda Aceh, Provinsi Banda Aceh; Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Ada 12 kegiatan telah dilaksanakan dalam bentuk *webinar*, *media briefing*, *talk show*, diskusi kelompok terfokus, dan pertemuan bilateral. Acara diikuti 613 orang, terdiri dari 157 laki-laki, 458 perempuan, dan dua orang yang tidak mengidentifikasi jenis kelamin, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Sebagian besar kegiatan berlangsung secara daring karena pembatasan mobilitas COVID-19. Hanya empat kegiatan yang dilaksanakan secara luring dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat.

Sebagai sandaran untuk kegiatan selanjutnya, INFID memproduksi lima dokumen, yaitu 1) Kertas kebijakan tentang urgensi RUU P-KS, 2) *Briefing paper* tentang urgensi RUU P-KS, 3) Kertas posisi tentang pengurangan angka perkawinan anak, 4) *Briefing paper* tentang urgensi Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mengurangi angka perkawinan anak, 5) Rekomendasi kebijakan tentang urgensi Peraturan Presiden untuk mencegah perkawinan anak. Kelima dokumen tersebut merupakan sumber penting untuk kerja advokasi pengesahan RUU P-KS dan pengurangan prevalensi perkawinan anak.

Secara spesifik, berkaitan dengan masalah perkawinan anak, advokasi difokuskan pada upaya mendesak pemerintah untuk mengeluarkan

⁹ <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Society/Pandemic-widens-gender-gap-across-Asia>

kebijakan mengurangi angka perkawinan anak, baik lewat Permendagri maupun Peraturan Presiden. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa, dan kelurahan.

INFID juga melakukan penyadaran publik melalui penyelenggaraan diskusi di wilayah Jabodetabek tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Diskusi publik dalam bentuk *talk show virtual* dengan topik “Perlindungan, Penanganan dan Pemulihan terkait Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam” menghadirkan narasumber tokoh Muhammadiyah, Fatayat NU, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan Komnas Perempuan. Diskusi yang dihadiri 85 peserta (72 perempuan, 13 laki-laki), berhasil memberikan edukasi kepada publik, terutama meluruskan kesalahpahaman yang masih terjadi. Tokoh yang mewakili ketiga organisasi Islam ini menyatakan secara tegas RUU P-KS tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam seperti yang selalu disampaikan pihak penentang RUU P-KS.

Selain diskusi, penyadaran publik dilakukan melalui media sosial. Atas alasan inilah INFID menyusun materi kampanye berupa infografis dan video pendek. Kegiatan ini telah menghasilkan tujuh video pendek, yaitu 1) Videografis perjalanan panjang dan berliku menuju keadilan bagi korban kekerasan seksual, 2) Suara kolektif untuk mengakhiri kekerasan seksual dan melindungi hak-hak korban, 3) Penghapusan perkawinan anak untuk mencapai kesetaraan gender, 4) Pandangan tokoh agama tentang pencegahan kekerasan seksual dengan narasumber Badriyah Fayumi (pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an Wal Hadist), 5) Prinsip Mubadallah (timbang balik/kesalingan) dalam melihat isu kekerasan seksual dengan menampilkan Faqihuddin Abdul Qadir (penulis buku *Qiraah Mubadallah*), 6) Pengesahan RUU P-KS oleh Marzuki Wahid (pendiri Fahmina). Video pendek ini diputar di tengah acara diskusi publik seperti telah disebutkan di atas.

Selain material berbentuk video pendek, INFID memproduksi infografis tentang, 1) Hasil survei atas tanggapan dan sikap masyarakat terhadap amandemen UU Perkawinan No. 16/2019, 2) Hasil survei atas tanggapan dan sikap masyarakat terhadap pemberlakuan batas usia minimum perkawinan, 3) Hasil studi kualitatif RUU P-KS, dan 4) Hasil studi kualitatif tentang Revisi

UU Perkawinan.

Materi kampanye disebarluaskan melalui akun media sosial INFID (Instagram, Twitter, Facebook) dan situs resmi, dan mendapat tanggapan positif. Hingga 14 Mei 2021 INFID telah mengunggah 1.277 materi kampanye *online* di 5 (lima) saluran media sosial INFID (situs web, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube). Konten yang diunggah antara lain poster kegiatan, artikel, *weekly insights* tentang kesetaraan gender, kekerasan seksual dan pernikahan anak, siaran pers, dan *live tweet* kegiatan. *Follower* media sosial INFID sebagian besar berusia 18-65 tahun (55 persen laki laki, 45 persen perempuan).

Selain bekerja di media sosial, INFID juga menggalang dukungan publik atas petisi untuk pengesahan RUU P-KS. Hingga 25 Mei 2021, telah terkumpul dukungan 34.832 orang melalui Change.org. Petisi menjadi pendukung bagi petisi serupa yang telah dikerjakan sejak tahun 2016 oleh Lentera Sintas Indonesia bekerja sama dengan gerakan Gerak Perempuan.

Kampanye secara luring dan daring dilakukan secara bersamaan. Kanal YouTube Parlemen menyiarkan secara langsung saat INFID mempresentasikan hasil kajian kuantitatif dan kualitatif tentang persepsi dan dukungan pemangku kepentingan terhadap RUU P-KS dalam audiensi publik atas undangan DPR RI. Sidang yang berlangsung di parlemen nasional dihadiri Komnas Perempuan dan The Body Shop.

Dalam konteks advokasi kebijakan, INFID menyelenggarakan serangkaian dialog kebijakan dan pertemuan bilateral antara OMS dengan koalisi WRO dan perumus kebijakan. Ada lima kali pertemuan antara INFID dengan pemerintah dan parlemen, meliputi 1) Dua audiensi dengan Komnas Perempuan untuk memperkenalkan program CEPAT SETARA sebagai bentuk dukungan advokasi RUU P-KS, dan mempresentasikan hasil studi kualitatif dan kuantitatif tentang RUU P-KS dan Revisi UU Perkawinan No. 16/2019, 2) Dua audiensi dengan Deputi 2 dan 4 Kantor Staf Presiden untuk menyampaikan dua penelitian yang sama, 3) Rapat dengar pendapat dengan badan legislasi DPR untuk menyampaikan hasil kajian RUU P-KS. Di antara pertemuan-pertemuan tersebut, terlihat komitmen pemerintah mendorong RUU P-KS. Namun, di parlemen masih ada partai politik, seperti P-KS, yang menyatakan keberatan dengan isi RUU tersebut dengan dalih

bertentangan dengan agama.

Guna memacu pembahasan RUU P-KS dan perlunya mengurangi angka perkawinan anak di tingkat nasional, INFID melanjutkan dengan menyelenggarakan tujuh kegiatan webinar yang dihadiri secara keseluruhan oleh 437 peserta (119 laki-laki dan 316 perempuan). Sementara di tingkat lokal, INFID menggagas tujuh kegiatan bersama dengan beberapa organisasi, antara lain 1) Bermitra dengan RUMPUN Malang menyelenggarakan FGD “Refleksi Efektivitas Revisi Usia Minimum Perkawinan dalam Mengurangi Perkawinan Anak di Malang Raya, 2) Bekerja sama dengan Flower Aceh dan PUSHAM Universitas Syiah Kuala melaksanakan tiga kegiatan, yaitu webinar, FGD, dan penyusunan kertas posisi dan media *briefing* “Kebijakan dan Perundang-undangan tentang Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban tentang Kekerasan Seksual dan Pemenuhan Hak Perempuan di Aceh”, 3) Bekerja sama dengan SCEDEI untuk webinar “RUU P-KS: Payung Hukum untuk Mengakhiri Kekerasan Seksual di Sumatera Barat”, 4) Bermitra dengan PIAR untuk dialog publik tentang perkembangan terbaru RUU P-KS di Nusa Tenggara Timur, 5) Diskusi tentang Perlindungan Perempuan dalam Rangka RUU P-KS di Kalimantan Timur, dan 6) Lokakarya tentang Perlindungan Perempuan dalam Rangka RUU P-KS di Tangerang.

Kendati ada kemunduran sesaat dalam advokasi sebagai konsekuensi tidak langsung dari pandemi COVID-19, RUU Pencegahan Kekerasan Seksual telah diajukan kembali untuk dibahas setelah dimasukkan kembali ke dalam daftar RUU prioritas tahun 2021 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, semakin banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menunjukkan dukungan. Mereka antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Tenaga Kerja; Asosiasi Pengusaha (Apindo); dan berbagai serikat pekerja seperti Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI); Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI); Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN); Serikat Pekerja Muslim Indonesia (Sarbumusi); dan Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN).

C. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) membutuhkan pendanaan besar.

Pandemi Covid-19 telah memperbesar celah pembiayaan SDGs yang sebelumnya sudah cukup lebar. Adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen.¹⁰

Mengatasi celah ini, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia meluncurkan program kerja sama lembaga PBB yang berjudul “Mempercepat Investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia/*Accelerating Sustainable Development Goals (SDGs) Investment in Indonesia – ASSIST*” untuk membuka jalan bagi mekanisme investasi dan pembiayaan baru. Program ini memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif dari sumber pemerintah dan non-pemerintah (misalnya publik, swasta, dan syariah) untuk mengisi kesenjangan pendanaan SDGs di Indonesia sebesar 4,7 triliun dolar AS.¹¹

Pandemi COVID-19 memperlebar celah pembiayaan dan mengganggu pencapaian 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030, terutama yang menyangkut pilar pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Kelompok rentan dan miskin mengalami penurunan pendapatan selama pandemi, logistik pangan terganggu akibat pembatasan sosial, akses terhadap pangan menurun akibat PHK yang terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi, pola belajar mengajar di sekolah bertumpu pada teknologi membuat anak sekolah dari keluarga miskin mengalami kesulitan, layanan kesehatan dan produksi di Indonesia terganggu, dan beban kerja perempuan di rumah tangga menjadi meningkat saat ruang kerja bergeser dari kantor ke rumah.¹²

Celah keuangan juga terjadi dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca. Proyeksi pada tahun 2010, penurunan emisi gas rumah kaca diperkirakan sebanyak 29 persen pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri. Penurunan akan meningkat menjadi 41 persen jika ada bantuan internasional. Dalam RPJMN Indonesia 2020-2024, Kementerian Keuangan telah menyediakan kalkulasi bahwa Indonesia membutuhkan dana kira-kira 3.770 triliun selama sepuluh tahun atau hampir 350 triliun per tahun dari tahun 2020 – 2030 untuk mencapai target 29 persen penurunan emisi.

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/11/23/celah-pembiayaan-makin-lebar-target-pencapaian-sdgs-tidak-bergeser>

¹¹ <https://indonesia.un.org/en/165381-pbb-luncurkan-program-baru-untuk-pacu-investasi-sdgs-di-indonesia>

¹² <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60eecd414ab/sdgs-indonesia-terusik-pandemi-mampukah-capai-targetnya-di-2030>

Akan tetapi, realisasi tidak lebih dari 90 triliun.

Realisasi yang rendah ini mengancam masa depan Indonesia. Indonesia berada di peringkat ketiga teratas di antara negara-negara dalam hal risiko iklim. Fenomena seperti banjir dan panas yang ekstrem adalah situasi yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Berkaitan dengan penanggulangan bencana pada tahun 2020, sebanyak 409 orang meninggal atau hilang, dan 6.451.439 orang terkena dampak dan/atau mengungsi akibat bencana.¹³

Apabila kemampuan negara beradaptasi terhadap iklim rendah, populasi warga yang terkena dampak banjir diperkirakan mencapai 1.400.000 penduduk pada 2035-2044. Indonesia juga sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan populasi penghuni zona pantai dengan elevasi yang lebih rendah. Total penduduk yang berpotensi terpapar banjir permanen pada tahun 2070-2100 bisa mencapai lebih dari 4.200.000 penduduk. Menurut laporan *United States Agency for International Development (USAID)*, bencana ekologis pada tahun 2050 diproyeksikan akan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar 132 triliun atau setara dengan 1,4% dari PDB Indonesia saat ini. Selain potensi kerugian besar ekonomi, sosial dan kehilangan nyawa jelas tidak dapat diabaikan.

Ancaman perubahan iklim juga bisa merambah ke sektor pangan. Sebagai bangsa yang mayoritas menjadikan beras sebagai makanan pokok, Indonesia perlu menyiapkan sebuah strategi pangan yang sistematis. Produksi beras sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim global pada fenomena El Nino berpengaruh pada curah hujan. Temperatur tinggi diproyeksikan dapat mengurangi produksi beras.

Peran dan Kontribusi INFID

Penguatan sistem kesehatan berjalan baik, ditandai dengan peningkatan puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan standar dari 23 persen (2019) menjadi 39,9 persen (2020), RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya dari 61,7 persen (2019) menjadi 75,04 persen (2020), serta obat-obatan berkualitas dari 78,6 persen (2019)

¹³ Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda

menjadi 90,6 persen (2020). Namun, per 18 Mei 2021, sebanyak 1,748 juta orang Indonesia telah terinfeksi COVID-19, mengakibatkan fokus utama sistem kesehatan bergeser ke penanganan pandemi. Akibat pandemi, pelayanan kesehatan dasar seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan penyakit tidak menular, dan pengelolaan penyakit menular lainnya terpengaruh.¹⁴

Mempromosikan akuntabilitas, daya tanggap, dan keterlibatan publik dalam pemberian layanan kesehatan selama pandemi Covid-19. Proyek ini sudah dimulai sejak November 2020 dan berakhir pada Juli 2022. Proyek ini mencoba mengatasi masalah mendesak karena pandemi dan tanggapan COVID-19. Masalah-masalah tersebut meliputi 1) Komunikasi publik dan pengungkapan yang tidak memadai tentang COVID-19, 2) Kurangnya integritas dalam pengadaan publik untuk pasokan, 3) Ketidakefektifan atau korupsi dalam pemberian layanan kesehatan, 4) Kurangnya akuntabilitas dan transparansi layanan kesehatan.

Proyek ini memiliki tiga tujuan khusus, yaitu 1) Membangun kapasitas dan meningkatkan koordinasi OMS untuk terlibat secara konstruktif demi respons COVID-19 yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, 2) Meningkatkan kesadaran di antara masyarakat dan kelompok rentan tentang risiko, hak atas sumber daya, dan perubahan perilaku yang diperlukan berkaitan dengan COVID-19, dan 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan dan program pemerintah dalam menanggapi krisis COVID-19.

Riset kembali menjadi tulang punggung dalam kerja INFID. Dalam proyek ini INFID telah menyelesaikan riset kuantitatif, yaitu survei warga. Dalam upaya untuk memberikan advokasi berbasis bukti mengenai layanan kesehatan Indonesia, khususnya dalam pandemi COVID-19, bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, INFID melakukan survei layanan kesehatan yang menyediakan bukti kuantitatif tentang akses, ketersediaan, dan kualitas layanan kesehatan. Riset memeriksa kualitas jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Lebih khusus lagi, riset menyediakan informasi tentang kinerja layanan kesehatan pada perempuan selama masa pandemi COVID-19.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dipandu dengan

¹⁴ Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda

kuesioner. Wawancara kepada warga dilakukan tatap muka secara langsung untuk menggali pengalaman kelompok rentan, khususnya perempuan di pemukiman padat, berkaitan dengan penggunaan fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19 di enam daerah. Total jumlah responden penelitian 540 orang dari 18 kecamatan di enam daerah. Setiap kecamatan terpilih 30 responden. Enam daerah yang menjadi lokasi survei adalah Kota Padang, Malang, Makassar, Surabaya, Semarang, dan Kabupaten Tangerang. Keenam daerah ini merupakan episentrum penyebaran COVID-19 di provinsi masing-masing. Pertimbangan lain adalah perbandingan demografi dan kemampuan ekonomi daerah.

Hasil dari survei warga memperlihatkan komunikasi dan informasi menjadi kunci efektivitas penanganan pandemi COVID-19. Selama pandemi, mayoritas warga di daerah mendapatkan informasi dari saluran tidak resmi (bukan dari pemerintah). Hal ini mengakibatkan warga cenderung meremehkan COVID-19. Akibat selanjutnya, mayoritas warga tidak patuh pada protokol kesehatan dan hampir tidak pernah melakukan testing COVID-19 meskipun di lingkungan mereka ada yang terpapar virus COVID-19. Temuan lainnya misalnya warga memiliki keengganan melakukan pengaduan layanan kesehatan yang buruk karena takut akan berbalik merugikan warga pelapor, dan sebagian justru ikhlas dengan kualitas layanan kesehatan yang ada.

Riset kualitatif, INFID bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia di enam daerah yang sama untuk melihat realisasi hak dan layanan kesehatan bagi perempuan. Laporan riset memperlihatkan adanya perbedaan kapasitas antar-pemerintah daerah. Perbedaan inilah yang mengakibatkan tidak lancarnya penanganan kesehatan pada saat kebijakan pusat diturunkan ke level kota/kabupaten. Temuan penting lainnya adalah daerah mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Hal ini mengakibatkan pasien COVID-19 tidak dapat dilayani dengan baik, sedangkan pasien non-COVID-19 cenderung dinomorduakan. Berkaitan dengan kesehatan perempuan, perempuan menjadi kelompok yang rentan terpapar COVID-19 karena lebih banyak andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan kegiatan perawatan. Melihat data dan kecenderungan tersebut, perumusan aturan atau kebijakan khusus bagi perempuan (*affirmative action*) dalam situasi pandemi COVID-19 atau pandemi serupa di masa akan datang menjadi hal yang diperlukan.

Hasil survei telah disampaikan kepada A. Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat). Hasil survei disampaikan kepada publik melalui jurnalis pada media *briefing* yang diselenggarakan oleh INFID. Media yang melaporkan hasil survei ini adalah Tirto, CNN Indonesia, Kompas, dan Suara.com.

INFID juga telah memberikan dukungan kepada jurnalis lokal di enam daerah untuk melakukan liputan investigasi mengenai kasus-kasus layanan kesehatan COVID-19. INFID memberikan dukungan kepada PBHI untuk pemberian bantuan hukum dan pengumpulan bukti dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan gugatan atas keberadaan aplikasi PeduliLindungi. Salah satu keberatan yang diangkat adalah pengelolaan aplikasi yang berpotensi melanggar hak-hak dasar pengguna (*user*), termasuk perlindungan data pribadi.

Petisi merespon dikeluarkannya Kepmensos tentang Penghapusan 9 Juta Peserta PBI di tengah situasi pandemi COVID-19. Kegiatan petisi ini bekerja sama dengan BPJS Watch. Dukungan sementara petisi yang diunggah di Change.org berjumlah 6022 dukungan (Per 09 May 2022), disertai komentar dan testimoni implementasi bansos dan penanganan COVID-19.

Bekerja sama dengan Perkumpulan PRAKARSA, INFID melaksanakan proyek “Parlemen Rendah Karbon 2030: Meningkatkan Kapasitas Parlemen Indonesia dalam Menuju Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia”. Secara umum, proyek bertujuan meningkatkan peran parlemen dalam tata kelola pembangunan rendah karbon yang berkualitas, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Secara khusus, proyek ini akan 1) Menyediakan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung inisiatif pembangunan rendah karbon di parlemen, 2) Meningkatkan suara, partisipasi, dan dukungan dari parlemen dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan rendah karbon, 3) Memperluas kesadaran, inisiatif, dan dukungan warga untuk pembangunan rendah karbon yang partisipatif dan berkelanjutan.

Ada perbaikan dalam konteks keberlanjutan lingkungan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) pada tahun 2019 mencapai 1.866.500 GT CO₂. Selama periode 2010-2019, potensi penurunan emisi GRK sebesar 23,46 persen dari *baseline*. Pada tahun 2019, penurunan emisi GRK sebesar 20,51 persen dari *baseline* atau sebesar 401.822,53 ribu ton CO₂e dan penurunan intensitas emisi GRK

sebesar 20,77 persen pada tahun 2019 dari *baseline* atau sebesar 420 ton CO₂e/miliar rupiah.¹⁵

INFID telah menyelesaikan laporan kajian pemetaan aktor di parlemen berkaitan dengan pembangunan rendah karbon. Hasil kajian ini digunakan INFID untuk melakukan advokasi pembangunan rendah karbon, khususnya pijakan penyelenggaraan webinar, “Mendorong Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon untuk Anggota DPRD dan Stakeholders”, diskusi kelompok terfokus “Pembangunan Rendah Karbon dan Dukungan Parlemen”, dan audiensi dengan Kaukus Ekonomi Hijau di parlemen.

Kegiatan penyadaran publik, INFID telah memproduksi Podcast, “Hambatan dan Tantangan dalam Mendorong Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia” dan menyelenggarakan *talkshow*, “Stimulus Fiskal Hijau untuk Pembangunan Rendah Emisi melalui APBN”. Podcast menghadirkan Binny Bichori (Perkumpulan PRAKARSA); Farhan Helmy (Kepala Sekolah Thamrin School); Mercy Chriesty Barends (Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) dan Komisi VII DPR RI). Sementara, *talkshow* menghadirkan 10 peserta, terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan yang berasal dari perwakilan pemerintah, lembaga penelitian otonom, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor. *Talkshow* menghadirkan narasumber, yaitu Kardaya Warnika (Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)); Illiza Sa’aduddin Djamal (Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)); Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA).

Komitmen 14 Open Government Partnership: Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data. Dalam rangka melaksanakan komitmen ini, INFID berkerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI). INFID berupaya mencapai target pada tahun 2021, yaitu terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan. INFID, Kemenkes, dan Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) telah melakukan tiga kali

¹⁵ Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda

diskusi untuk memetakan inisiatif dan mendorong pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang mudah diakses oleh publik, khususnya dalam masa pandemi COVID-19.

Di bidang tata kelola, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk perbaikan pelayanan kesehatan. Aplikasi *M-Health* berbasis website merupakan bentuk dukungan teknologi informasi pendataan yang terinspirasi pendataan keluarga sehat. Sebanyak 12 indikator secara rinci berkaitan dengan keluarga yang mengikuti KB, ibu bersalin, imunisasi dasar lengkap, ASI 6 bulan, pemantauan balita, TB, hipertensi, gangguan jiwa berat, tidak ada anggota yang merokok, akses air bersih dan jamban sehat, anggota JK/ akses. *M-Health*, idealnya terintegrasi data individu dan keluarga dengan pendekatan keluarga. Pemanfaatannya dilakukan pada fasilitas kesehatan. Pengembangan *M-Health* harapannya dapat meningkatkan kualitas manajemen, memudahkan kembali koordinasi, dan meningkatkan kualitas SDM dengan pendekatan E-Learning.

Dalam konteks implementasi Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI), Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi di 25 puskesmas di tiga provinsi. Sosialisasi masih terbatas beberapa fitur (sosialisasi dasar). Ada beberapa tahapan pekerjaan yang kurang efektif selama pandemi. Harapannya, sosialisasi tetap bisa dilakukan dengan mekanisme yang bisa disesuaikan dengan pandemi. Pada tahun 2021, ada 250 puskesmas yang menjadi target sosialisasi.



Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Era Demokrasi 4.0 di Indonesia.

Bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), INFID menyusun riset bagian dari Prioritas Riset Nasional (PRN) dengan tema “Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Era Demokrasi 4.0 di Indonesia”. Proyek riset direncanakan berlangsung selama tiga tahun.

Riset berlangsung sejak Juli 2020 hingga September 2021. Riset jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana peran OMS dalam mendorong kesetaraan gender dalam demokrasi Indonesia di era digital dan memberikan gambaran pendekatan teoritis maupun konseptual berkaitan dengan ketimpangan gender dalam dunia digital. Penelitian mengembangkan kerangka konseptual yang diadopsi dari empat level akses terhadap teknologi informasi dan komputer serta sebagian *Digital Divide Index* (DDI).

Pengumpulan data dikerjakan melalui wawancara mendalam kepada 26 informan kunci secara *purposive* dari praktisi teknologi, aktivis/politis dan pimpinan OMS di Indonesia. Setiap rekaman wawancara selanjutnya ditranskrip secara verbatim dan diolah lebih lanjut ke dalam program NVivo 12. *Peer Review* atas laporan penelitian melibatkan Yanu Endar Prasetyo (Peneliti Kebijakan Publik), Suraiya Kamaruzzaman (Pendiri Flower Aceh dan Dosen Universitas Syiah Kuala), dan Marlis Afridah (Founder and CEO Green Network).

INFID telah menyelenggarakan seminar nasional untuk diseminasi hasil riset “Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital”. Siaran pers atas seminar ini telah dipublikasikan oleh 14 media cetak dan digital, di antaranya adalah Yahoo, AntaraNews, Gatra, Kompas.id, Kompas Cetak, Kabar24bisnis, dan lain lain. Sedangkan prosiding seminar dalam proses *submission* ke Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (JIS, p-ISSN 1411-8254, e-ISSN 2548-4893).

Laporan penelitian menjadi dasar penyusunan materi advokasi. *Policy Brief* telah disusun dengan judul “Urgensi Kebijakan untuk Menangani Ketimpangan Gender Digital, serta Pentingnya Mempercepat Inisiatif Baik

OMS untuk Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital". Dialog kebijakan diselenggarakan dengan mengundang perwakilan 5 (lima) kementerian/lembaga pemerintah, yaitu Kantor Staf Presiden; Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas; Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Action for Sustainable Development (A4SD). INFID sebagai anggota Pilar Hukum dan Tata Kelola serta Kelompok Kerja Tujuan TPB, terus mendukung pelaksanaan dan pencapaian TPB di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun kajian "Persepsi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Agenda Pembangunan TBP 2030". Kajian dilatarbelakangi mendesaknya pelaksanaan agenda TPB yang efektif dan komitmen dari pemerintah untuk pencapaian 17 TPB pada 2030. INFID memandang kebutuhan pelibatan masyarakat sipil dalam prosesnya dan untuk menemukan cara inovatif yang memungkinkan semua suara didengar.

Pengumpulan data primer, INFID membuat kuesioner Google Form dengan beberapa pertanyaan singkat (sekitar 40 menit). Kuesioner diisi 90 responden dari perwakilan OMS, termasuk 40 laki-laki dan 46 perempuan, sedangkan sisanya tidak sebutkan jenis kelaminnya. Sebanyak 30 persen di antaranya adalah LSM nasional; 24,4 persen bekerja di Jawa; 13,3 persen dari Sumatera; 11,1 persen dari Sulawesi; 8,9 persen dari Indonesia Timur; 4,4 persen dari Kalimantan; dan 7,8 persen dari daerah lainnya. Sekitar 57,8 persen responden adalah direktur (pengambil keputusan) di lembaga masing-masing.

INFID juga menyelenggarakan serangkaian diskusi kelompok terfokus untuk penyusunan riset "Scorecard Warga 2021 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". Kegiatan ini bertujuan untuk menggali suara masyarakat sipil dalam mengevaluasi pencapaian TPB untuk enam tahun terakhir dan menganalisis rekomendasi untuk implementasi SDGs lebih inklusif dan partisipatif. Diskusi dihadiri oleh 17 orang ahli (8 laki-laki dan 9 perempuan) dari OMS nasional dan lokal. Mereka bekerja pada isu media, gender, buruh migran, anak-anak, TPB desa, anak muda.

Kajian pakar atas draf awal "Scorecard Warga 2021 untuk Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". Tinjauan ahli bertujuan untuk mendapatkan masukan atas draf awal laporan "*People Scorecard*", terutama dari asesmen, metodologi, data, sumber/referensi, dan analisis. Karena tujuan 14 dan 9 menerima responden terendah dalam kuesioner, INFID mengundang *reviewers* dari tujuan tersebut untuk memberikan lebih banyak perspektif. INFID juga mengundang para ahli dari latar belakang hukum dan HAM untuk memastikan perspektif HAM dalam laporan. Mereka adalah Totok Yuliyanto, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Persatuan (PBHI); Khotimun, Direktur Eksekutif Persatuan Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum; Widuri, Plt. Direktur Eksekutif Asosiasi Kemitraan ICT Indonesia (ICT Watch); Budi Laksana, Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI).

Kajian ini secara umum menemukan bahwa upaya maksimal telah dilakukan pemerintah. Namun, sinergi antarlembaga serta antara pusat dengan daerah dalam mendorong pencapaian TBP belum maksimal. Survei daring menunjukkan masih banyak organisasi masyarakat sipil, khususnya di daerah, yang belum mengetahui secara detail mengenai RAN dan RAD TPB. Temuan lainnya adanya perubahan narasi dan dorongan yang menggembirakan dari kelompok sektor privat/bisnis untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dan menghormati hak asasi manusia. OMS cukup banyak berperan dalam melakukan kampanye penyadaran dan kolaborasi dengan sektor privat dalam implementasi nilai-nilai bisnis yang berkelanjutan. Namun, proses untuk membahas suatu permasalahan lintas sektor yang melibatkan multipihak (pemerintah, sektor bisnis, masyarakat sipil, universitas, dan media) masih sulit untuk dilakukan.

Afternoon Talk Webinar "Situasi Pemahaman Publik dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". Seiring dengan momentum Sidang Umum PBB 2021 dan The Global Week #Act4SDGs, INFID menyosialisasikan hasil kajian *People Scorecard* dan mengadakan diskusi publik untuk mendapatkan rekomendasi dari warga dan pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi TPB yang lebih inklusif dan partisipatif. Acara dilakukan secara daring melalui format webinar menggunakan Zoom. INFID menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk memastikan inklusivitas penyandang disabilitas. Kegiatan ini diikuti oleh 34 orang, terdiri dari 15 laki-laki dan 19 perempuan. Siaran secara langsung melalui Kanal INFID

di Youtube ditonton oleh 110 pemirsa. Pembicara webinar adalah Diani Sadia Wati (Ketua Pilar Hukum dan Tata Kelola Nasional SDGs Pokja/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional); Zumrotin K.S. (Tim Pelaksana Nasional SDGs); Gracia Paramitha (Co-Founder Indonesian Youth Diplomacy (IYD)); Djonet Santoso (Pusat SDGs Universitas Bengkulu); Bayu Wardhana (Aliansi Jurnalis Independen).

Webinar “Program Vaksinasi COVID-19 dan Dukungannya untuk Kelompok Rentan”. Webinar diikuti oleh 36 orang, 19 laki-laki dan 17 perempuan. INFID menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk memastikan inklusivitas penyandang disabilitas. Siaran langsung di Kanal INFID di YouTube diikuti 150 pemirsa. INFID mengundang Halida P. Widyastuti (Manajer Riset PT. Kalbe Farma, Tbk); Timboel Siregar (Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Watch); Maulani Rotinsulu (Ketua Asosiasi Umum Penyandang Disabilitas Indonesia/HWDI); dan Devi Anggraini (Ketua Aliansi Perempuan Masyarakat Adat Nusantara/AMAN) sebagai narasumber.

Kelompok kerja untuk Peraturan Presiden tentang Pendanaan Publik untuk OMS di Indonesia. Pokja terbentuk sejak Januari 2021 dan beranggotakan INFID, KAPAL Perempuan, Konsil LSM, Transparansi Internasional Indonesia (TII), Prakarsa, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Penabulu Foundation, dan REMDEC. Pokja dibentuk sebagai tindak lanjut atas undangan pertemuan oleh BAPPENAS dan undangan pertemuan oleh KSP. Pada dua pertemuan tersebut, BAPPENAS dan KSP berkomitmen mendukung lahirnya dukungan pendanaan OMS oleh negara.

Sepanjang tahun 2021 pokja telah menyelesaikan *background paper*. Dokumen ini disusun sebagai bahan referensi untuk mempersiapkan pembentukan Dana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. *Background paper* mengangkat empat tema utama, meliputi 1) Urgensi Pendanaan OMS, Peluang dan Tantangan: Pengalaman Indonesia dan Internasional dalam Dukungan Pendanaan kepada OMS, (2) Dasar Hukum, Struktur Kelembagaan dan Aspek Tata Kelola untuk Inisiatif Pendanaan OMS, 3) Jenis OMS yang Didanai dan Skema dan Operasi Pendanaan OMS, dan 4) Tingkat Dukungan OMS Indonesia terhadap Urgensi Pendanaan Pemerintah.

Empat *background paper* kemudian dikompilasi dalam satu dokumen

dan menjadi dasar perumusan pilar-pilar utama dalam pembentukan badan pendanaan LSM Indonesia yang mencakup 1) Bentuk kelembagaan, 2) Kerangka hukum dan regulasi, 3) Pembangunan kapasitas, 4) Model kerja sama, dan 5) Model pembiayaan. Selain dokumen ini, pokja telah menyelesaikan penyusunan draf Perpres. Draf disusun oleh empat peneliti utama yang memiliki keahlian di bidang hukum dan demokratisasi di Indonesia dan mendapatkan masukan dalam *Expert Review* secara daring dari tiga ahli dari Kementerian Keuangan dan dua perwakilan masyarakat sipil dalam isu hukum dan organisasi masyarakat sipil.

Berbekal dua dokumen ini, pokja menyelenggarakan konsultasi regular secara daring dengan KSP dan BAPPENAS bertujuan meminta masukan serta bersama-sama merumuskan strategi ke depan. Selain itu, beberapa pertemuan resmi luring juga telah diselenggarakan, di antaranya audiensi draf perpres dan *background paper* dengan Wariki Sutikno (Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS) dan Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia).

BAB III

INFID DALAM MEDIA

Media Massa

HAM dan Demokrasi. Sepanjang tahun 2021 ada 134 liputan dari media massa, baik cetak maupun *online*. Media massa nasional seperti Kompas, Tempo, CNN, Media Indonesia, Republika, Detik dan lain-lain, liputan atas INFID juga dilakukan oleh sejumlah media massa daerah. Sebanyak 68 liputan di antaranya merupakan laporan kegiatan Festival HAM 2021 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sepanjang tahun 2021 ada 45 liputan dari media massa, baik cetak maupun *online*. Sebanyak 14 liputan di antaranya muncul sebagai bagian dari kerja media *briefing* yang dilakukan oleh INFID.

Media Sosial

Internet dan media sosial telah menguasai ruang komunikasi anak muda, termasuk ruang mengekspresikan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dominasi ini terkesan begitu kuat dibanding media massa konvensional, seperti media cetak dan televisi.

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 60,6 persen generasi Z atau anak muda kelahiran 1995-2005 mengakses berita politik melalui media sosial. Secara rinci, 60,6 persen pemilih pemula yang mengakses berita politik melalui internet dalam tiga kategori intensitas. Sebanyak 36 persen mengakses berita politik melalui internet. Sebanyak 22,3 persen sering mengakses berita politik melalui media sosial dan sisanya 2,3 persen sangat sering. Sebanyak 16,8 persen pemilih pemula sering berdiskusi mengenai politik melalui media sosial ataupun secara langsung. Persentase itu lebih tinggi dibanding pemilih usia di atas 24 tahun, hanya 15,1 persen yang sering berdiskusi politik. Bahkan, 7,6 persen pemilih muda sering menyampaikan keluhan kepada pemerintah melalui media sosial. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih usia di atas

24 tahun, yaitu sebesar 6,8 persen.¹⁶

Hal yang sama terungkap dari laporan Survei Indikator tentang suara anak muda atas isu politik yang beredar di tengah masyarakat. Anak muda paling sering mengakses berita politik melalui secara *online*, kemudian TV. Sangat sedikit yang mengakses berita melalui koran dan radio. Di antara masyarakat yang mengikuti berita *online*, 78 persen mengaksesnya melalui media sosial. Instagram paling banyak menjadi sumber berita, kemudian Facebook dan YouTube. Dalam seminggu terakhir, mayoritas anak muda (60,1 persen) melakukan tindakan berkomentar tentang berita di media sosial. Sekitar 31,8 persen membagi berita di media sosial.¹⁷

Bisnis dan HAM: Terdapat tujuh belas konten yang sudah disebar melalui media sosial berkaitan dengan isu bisnis dan HAM pada tahun 2021. Ketujuh belas konten tersebut secara total telah dilihat dan dibaca 28.445 kali oleh publik per tanggal 14 Maret 2022.

Toleransi: INFID telah memublikasikan konten sebanyak 61 artikel, 17 video, 19 infografis, dan 2 podcast.

Ketimpangan: Materi kampanye ini disebarluaskan melalui akun media sosial INFID (Instagram, Twitter, Facebook) dan situs resmi, dan mendapat tanggapan positif. Hingga 14 Mei 2021 INFID telah mengunggah 1.277 materi kampanye *online* di 5 (lima) saluran media sosial INFID (situs web, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube). Konten yang diunggah antara lain poster kegiatan, artikel, *weekly insights* tentang kesetaraan gender, kekerasan seksual dan pernikahan anak, siaran pers, dan *live tweet* kegiatan. *Followers* media sosial INFID sebagian besar berusia 18-65 ke atas, di antaranya 55 persen laki laki dan 45 persen perempuan.

Sejak Juli 2021, media sosial INFID mendapatkan perhatian khusus dari Tim Komunikasi INFID. Tim Komunikasi INFID mengubah tampilan khususnya pada laman Instagram menjadi lebih berkarakter anak muda dan segar, dengan nuansa warna biru dan abu-abu. Beberapa kali INFID mempromosikan staf mudanya melalui konten media sosial dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari para pengikut. Dampak

¹⁶ <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a55e40ff3a/lipi-60-anak-muda-akses-berita-politik-lewat-media-sosial>

¹⁷ Rilis Survei Indikator. "Survei Nasional Suara Anak Muda tentang Isu-isu Sosial Politik Bangsa," Temuan Survei: 4 – 10 Mar 2021

langsung dari inisiatif ini membuahkan hasil yang positif. Media sosial Instagram tercatat sebagai platform yang mengalami pertumbuhan paling pesat. Dalam periode 12 bulan tersebut, pengikut akun Instagram INFID mengalami peningkatan sekitar 900 followers baru dari 3,826 pada Juli 2021 menjadi 4,727 pada Mei 2022. Sementara, untuk Twitter dan Facebook juga mengalami pertumbuhan, namun belum secara signifikan.

BAB IV

INFID DI TENGAH MASYARAKAT

A. Dampak Nyata Kerja INFID

Di tingkat nasional, setelah membuktikan diri sebagai organisasi yang secara konsisten berusaha ikut serta memajukan pembangunan, INFID mendapat kepercayaan menjadi salah satu mitra non-pemerintah dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) di Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, telah membentuk gugus tugas sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.HA.01.07 Tahun 2021. Ada 20 kementerian/lembaga pemerintah dan tujuh lembaga non-pemerintah yang masuk di dalamnya. Gugus tugas memiliki mandat mengoordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM di tingkat nasional. Secara spesifik, INFID mendapat tugas menangani harmonisasi dan penyalarsan regulasi dan kebijakan terkait bisnis dan HAM.

Kepercayaan yang sama juga diterima dari kalangan masyarakat sipil. INFID ditunjuk menjadi anggota Steering Committee Open Government Indonesia. Dalam Steering Committee ini, INFID ikut berperan menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah (*open government*), menetapkan program strategis, serta menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan rencana aksi. INFID juga ditunjuk sebagai Chair C20, salah satu kelompok *engagement* resmi, yang akan terlibat dalam proses G20 di bawah Presidensi Indonesia. C20 mendapat mandat untuk menyusun proposal kebijakan berdasarkan aspirasi dari masyarakat sipil di dunia tidak hanya terbatas pada masyarakat sipil dari negara anggota G20. Proposal kebijakan akan disampaikan kepada para Pemimpin G20 yang akan bertemu dalam G20 Summit di akhir 2022 di Bali untuk mengidentifikasi masalah dan membahas langkah-langkah penyelesaian masalah di tingkat global.

INFID memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan TPB/SDGs di 11 (sebelas) daerah. Di antara kesebelas daerah, ada 10 (sepuluh) daerah

yang telah memiliki tim pokja yang terlibat dalam pembentukan RAD, 7 (tujuh) daerah di antaranya disertai dengan SK Kepala Daerah. INFID berkontribusi dalam proses terbentuknya SDGs Center Unsyiah dan SDGs Center Universitas Bengkulu. Pertambahan jumlah ini, secara total di tingkat nasional telah terbentuk 25 SDGs Center/Network/Hub di berbagai perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan SDGs di tingkat nasional dan daerah. Partisipasi di tingkat nasional ditunjukkan pada saat INFID aktif dalam proses penyusunan *Voluntary National Review* (VNR) untuk Indonesia yang dilaporkan pada *United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development* pada tahun 2017, 2019 dan 2021. Survei warga dan OMS berkaitan dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah menjadi bagian dalam pelaporan VNR 2021.

B. Inovasi Program

Saluran daring yang didedikasikan secara khusus bagi warga untuk pengaduan atas layanan publik merupakan gagasan sekaligus inovasi yang ditawarkan INFID kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, sepanjang tahun 2021.

Lepas dari perkara perbedaan jumlah dan kualitas infrastruktur antardaerah yang mengakibatkan layanan internet tidak merata dan kesenjangan pendapatan antar kelompok penduduk yang menyumbang ketidakadilan secara digital, kepemilikan telepon seluler pintar di antara penduduk Indonesia dapat dikatakan relatif tinggi. Berbagai inovasi dikembangkan untuk menjawab kebutuhan yang ada, sekaligus menciptakan kebutuhan baru bagi masyarakat.

Dalam konteks layanan publik pada era pandemi COVID-19, untuk kepentingan mendorong lebih maju penghargaan atas HAM dan prinsip pemerintahan yang terbuka, pengaduan warga yang sebelumnya terganggu, misalnya atas alasan jarak geografis dan kebudayaan paternalistik, dapat diatasi. Mekanisme pengaduan warga secara daring bisa memangkas jarak geografis, sekaligus biaya ekonomi yang melekat di dalamnya, membuat setiap warga memiliki kesempatan terbuka untuk melayangkan pengaduan atas layanan publik secara cepat, mudah, dan murah. Mekanisme pengaduan telah mendorong proses semakin menjadi impersonal. Melalui mekanisme ini, kesungkanan warga yang mewarnai

kehidupan sehari-hari saat berhadapan dengan pejabat menjadi relatif berkurang.

Dalam perspektif HAM, pemerintah mesti menghormati hak untuk didengar (*right to be heard*). Pengaduan warga atas layanan publik yang menjadi bagian dari suara warga yang mesti didengar pula. Dalam perspektif pemerintahan yang terbuka, pengaduan warga adalah umpan balik menduduki posisi penting untuk perbaikan kualitas layanan publik.

Atas gagasan inilah, mekanisme pengaduan secara daring dikembangkan berdasarkan bukti yang kuat. Bukti dikumpulkan lewat survei warga dan asesmen atas layanan publik yang ada untuk melihat kesenjangan antara hak, kebutuhan, dan aspirasi warga dengan keberadaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hasil survei dan asesmen yang telah melalui proses *peer review* menjadi sandaran utama bagi para pemangku kepentingan untuk menciptakan bersama-sama mekanisme pengaduan didesain untuk perbaikan layanan publik. Beberapa daerah, misalnya Kota Padang, Malang, Makassar, Surabaya, Semarang, dan Kabupaten Tangerang, telah melakukan uji coba atas inovasi ini sekaligus mengembangkan panduan untuk memastikan uji coba ini bisa ditiru dan dikerjakan di daerah lain.

Inovasi lain yang ditawarkan INFID adalah *peer learning*. Selain pengembangan kapasitas yang dilakukan lewat serangkaian pelatihan, lokakarya, dan kunjungan belajar, sepanjang tahun 2021 INFID menerapkan *peer learning* pada pelaksanaan program HAM. *Peer learning* membuka ruang bagi para pekerja yang menangani deportasi dan returni untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, dan gagasan pemecahan masalah dalam kelompok kecil untuk memastikan mereka dapat berintegrasi kembali kepada masyarakat. *Peer learning* dapat dikerjakan dengan bantuan teknologi. Para penggiat ini memanfaatkan Whatsapp Group sebagai platform untuk kepentingan ini. Mekanisme yang sama juga dilakukan dalam konteks kota/kabupaten HAM, baik ASN maupun masyarakat sipil dapat belajar dari *champions* berbagai daerah untuk memajukan praktik HAM di wilayah kerja masing-masing. Hal yang sama juga terjadi pada saat INFID memperkenalkan prinsip pemerintahan terbuka pada birokrasi daerah.

LAMPIRAN I

DAFTAR KEGIATAN INFID SEMUA PROGRAM

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Diskusi WA Group Forum Multi-Stakeholder di Jawa Barat dan Jawa Timur	Januari - Maret 2021
2.	Webinar 3: "Masa Depan Deportan & Returni Anak"	12 Januari 2021
3.	<i>Workshop</i> penelitian "Pemetaan Gerakan Penyebaran Ekstremisme di PTN Pasca-Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas)"	19 Januari 2021
4.	<i>Focus Group Discussion</i> "Memikirkan Strategi Penguatan Toleransi dan Kebinekaan Pasca-Pelarangan FPI"	24 - 26 Januari 2021
5.	Pelatihan Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Radikalisme Ekstremisme bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Keagamaan di Jawa Timur berlangsung di Surabaya	27 – 29 Januari 2021.
6.	Pelatihan Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Radikalisme Ekstremisme bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Keagamaan Jawa Barat berlangsung di Bandung	1 – 3 Februari 2021
7.	<i>Virtual Focus Group Discussion</i> (FGD) "Rencana Tindak Lanjut Workshop Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar	22 Februari 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL
	Radikal Ekstremisme di Kota Bandung, Jawa Barat”	
8.	Peninjauan <i>Risk Assessment Tools</i> (RATs)	23 Februari - 23 Maret 2021
9.	<i>Virtual Focus Group Discussion</i> (FGD) “Rencana Tindak Lanjut Workshop Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Radikal Ekstremisme di Kota Surabaya, Jawa Timur”	23 Februari 2021
10.	Penulisan Buku <i>Human Rights Cities in Indonesia</i>	Maret 2021
11.	“Konsolidasi Masyarakat Sipil dalam Konteks Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Zaman Bertukar Musim Berganti Kita Tetap Kolaborasi”	4-5 Maret 2021
12.	Diskusi Penggalian Data “Intervensi Internet Berbasis Komunitas di Wilayah Terpencil Indonesia untuk Mendorong Transformasi Digital yang Lebih Inklusif”	09 Maret 2021
13.	<i>Peer Review Inception Report Studi</i> Kuantitatif LD UI dan Studi Kualitatif (KPI) Online	12 Maret 2021
14.	Webinar BHR #5 “Bisnis dan Perempuan: Hak yang Diperjuangkan”	15 Maret 2021
15.	Diskusi Terfokus Penggalian Data Kajian Pemetaan Aktor di Parlemen dan Wacana terkait Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia	16 Maret 2021
16.	<i>Media Gathering</i> “Launching Survei Persepsi dan Sikap Generasi Muda terhadap Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan”	23 Maret 2021
17.	Penyusunan <i>Risk Assessment Tools</i> Baru “Kesiapan Integrasi Kelompok ”	April - Desember 2021
19.	Kampanye <i>Online</i> Kolaborasi dengan Organisasi Islam di Indonesia untuk Mempromosikan Toleransi Beragama dan Perdamaian	April - Desember 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL
20.	Penulisan Buku <i>Indikator Kota HAM: Studi Praktik Penyelenggaraan Kota HAM di Dunia dan di Indonesia</i>	April 2021
21.	FGD Ekstraksi Data Riset "Kesetaraan Gender di Era Demokrasi 4.0: Peran Organisasi Masyarakat Sipil"	12 April 2021
22.	<i>Launching & Diskusi Panduan Teknis "Penanganan & Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme"</i>	21 April 2021
23.	Penandatanganan MoU Festival HAM 2021	28 April 2021
24.	Webinar Talk Ekonomi Hijau "Mendorong Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon untuk Anggota DPRD dan <i>Stakeholders</i> "	29- 30 April 2021
25.	Webinar BHR #6 "Pekerja Informal dalam Praktik Bisnis di Indonesia: Sejauh Mana Mereka Berdaya?"	29 April 2021
26.	Evaluasi & Refleksi Program Meningkatkan Sistem Reintegrasi Penanganan & Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme di Kota Bandung, Jawa Barat	1 Mei 2021
27.	Penyusunan "Modul Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI"	Mei - Agustus 2021
28.	Evaluasi & Refleksi Program Meningkatkan Sistem Reintegrasi Penanganan & Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme di Kota Surabaya, Jawa Timur	3 Mei 2021
29.	Audiensi Bersama Kaukus Ekonomi Hijau	05 Juni 2021
30.	Open Government Week 2021	20 Mei 2022
31.	Konsultasi dan Diseminasi Program "Meningkatkan Sistem Reintegrasi untuk Penanganan dan Pendampingan Deportan dan/Returni Perempuan	24 – 25 Mei 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL
	dan Anak Korban Radikalisme di Kota Bandung dan Surabaya” bagi Pemerintah Daerah, Ormas Keagamaan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Hotel Aryaduta Jakarta	
32.	Riset “Ekstremisme dan Intoleransi dalam Beragama: Studi Kasus Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah dan Nasional”	Juni - Oktober 2021
33.	Penyusunan Modul Sekolah Demokrasi <i>Online</i> : Memperkuat Demokrasi dan Toleransi; Mencegah Ekstremisme Kekerasan	Juni - Agustus 2021
34.	Riset “Aktivisme Islam di Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi: Studi Kasus di SMAN 51 Jakarta, SMAN 31 Jakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Telkom University”	Juni - Oktober 2021
35.	Webinar BHR #7 “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Memastikan Implementasi Bisnis Berbasis HAM”	7 Juni 2021
36.	<i>Expert Review</i> Riset Nasional (PRN) INFID “Kesetaraan Gender di Era Demokrasi 4.0: Peran Organisasi Masyarakat Sipil”	11 Juni 2021
37.	Webinar BHR #8 “Satu Dekade Implementasi UNGPs di Indonesia: Mengukur Kemajuan dan Tantangannya di Berbagai Sektor” bekerja sama dg ELSAM, Konsil LSM, dan HRWG dalam rangka 1 Dekade UNGPs	16 Juni 2021
38.	Diskusi Terfokus untuk Persiapan Riset “ <i>People’s Scorecard 2021 for Sustainable Development Goals in Indonesia</i> ”	22 Juni 2021
39.	Podcast “Hambatan dan Tantangan dalam Mendorong Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia”	25 Juni 2021
40.	Expert Review untuk Draf Awal Laporan Riset	30 June 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL
	<i>"People's Scorecard 2021 for Sustainable Development Goals in Indonesia"</i>	
41.	Survei Warga "Sikap Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap Toleransi, Kebinekaan dan Kebebasan Beragama di Indonesia"	Juli - Oktober 2021
42.	"Diskusi Kelompok Terarah untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia"	13 Juli 2021
43.	Webinar BHR #9 "Urgensi Dorongan Asosiasi Bisnis dalam Memastikan Implementasi Bisnis dan HAM yang Ramah terhadap Perempuan"	14 Juli 2021
44.	Webinar BHR #10 "Urgensi Dorongan Asosiasi Bisnis dalam Memastikan Implementasi Bisnis dan HAM dalam Konteks Lingkungan dan Perubahan Iklim"	15 Juli 2021
45.	Webinar tentang Program Vaksinasi COVID-19 dan Dukungannya untuk Kelompok Rentan	19 Juli 2021
46.	<i>Talkshow</i> "Stimulus Fiskal Hijau untuk Pembangunan Rendah Emisi Melalui APBN"	27 Juli 2021
47.	Peluncuran Kertas Kebijakan Bisnis dan HAM: Pengintegrasian Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan atas Perubahan Iklim dalam Kebijakan tentang Bisnis dan HAM di Indonesia"	28 Juli 2021
48.	Koordinasi Meeting INFID, Kemenkes dan OGI Renaksi 14 "Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data"	29 Juli , 18 Agustus dan 01 Desember 2021
49.	Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Bogor	4 - 12 Agustus 2021
50.	<i>Media Briefing</i> "Hasil Survei Warga: Akses & Pelayanan Kesehatan di 6 Kab/Kota di Era Pandemi COVID-19"	13 Agustus 2021
51.	Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Kota Semarang	16 Agustus - 7 September 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL
52.	Hasil penelitian "Peran Perempuan dalam Organisasi Berbasis Keagamaan dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan" disampaikan kepada perwakilan Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BNPT, dan Komnas Perempuan.	16 Agustus 2021
53.	Pelatihan Kota HAM 2021 Kota Semarang.	16 Agustus – 7 September 2021
54.	Penyampaian hasil penelitian "Pemetaan Gerakan Penyebaran Ekstremisme di PTN Pasca-Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas)" kepada perwakilan Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, KSP, Kementerian Agama, BNPT, dan Bappenas.	20 Agustus 2021
55.	Lokakarya Negosiasi Agenda Perubahan Iklim Menggunakan Pendekatan Sistem dan Simulasi En-ROADS.	20-21 Agustus 2021
56.	Audiensi Survei Warga COVID-19 dan Layanan Kesehatan di 6 Daerah Kota Kabupaten ke Dr (HC). Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan 3 Tim DPR.	24 Agustus 2021
57.	Peer Review Dampak COVID-19 terhadap Realisasi Hak dan Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan di 6 Daerah (Semarang, Padang, Malang, Surabaya, Makassar, dan Kab.Tangerang) Online.	27 Agustus 2021
58.	Sekolah Demokrasi Online untuk Perwakilan Pemerintah, CSO/Ormas, dan Kelompok Minoritas Angkatan 1.	14 - 30 September 2021
59.	Seminar Nasional Diseminasi Hasil Riset dan <i>Policy Brief</i> "Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital".	20 September 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL
60.	Diseminasi Hasil Riset dan <i>Policy Brief</i> "Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital" ke-5 Kementerian/Lembaga.	24 September 2021
61.	<i>Afternoon</i> Talk Webinar: "Situasi Pemahaman Publik tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan".	29 September 2021
62.	Pelatihan Islam yang Damai dan Toleran untuk para Guru Pendidikan Agama Islam (PAI): Memperkuat Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di Solo Raya.	1 - 3 Oktober 2021
63.	Penyusunan Petisi BPJS yang telah ditandatangani oleh 6022 (Per 09 May 2022).	3 Oktober 2021
64.	<i>World Human Rights Cities Forum 2021 "Human Rights Cities in Indonesia: Human Rights Cities as a Strategy and Practice to Promote Tolerance and Freedom of Religion and Belief across Indonesia"</i> .	8 Oktober 2021
65.	<i>Workshop Sosialiasi Risk Assessment Tools (RATs)</i> dalam Upaya Penanganan Deportasi dan Returni kepada para stakeholders Pusat dan Daerah.	25 Oktober 2021
66.	Audiensi dengan BNPT dan Densus 88 mengenai <i>Risk Assessment Tools</i> Baru Penanganan Deportasi dan Returni.	26 Oktober 2021
67.	Workshop Penyusunan Code Book dan Manual Book <i>Risk Assessment Tools (RATs)</i> .	30 Oktober 2021
68.	Festival HAM 2021, Pleno 4 HRC, Parallel 6 BHR, Special Event PVE, <i>Special Event Youth Fellow</i>	November 2021
69.	Sekolah Demokrasi <i>Online</i> untuk perwakilan pemerintah, CSO/Ormas, dan kelompok minoritas Angkatan 2.	3 - 24 November 2021
70.	<i>Road to University</i> UNIKA.	4 November 2021
71.	<i>Roadshow to University</i> Festival HAM 2021.	5 November 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL
72.	Pelatihan Islam yang Damai dan Toleran untuk para Guru Pendidikan Agama Islam (PAI): Memperkuat Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di Depok.	5-7 November 2021
73.	<i>Road to University</i> UNSOED.	5 November 2021
74.	Audiensi dengan PBNU dan PP Muhammadiyah dilaksanakan secara luring.	8 November 2021
75.	Media <i>Briefing</i> Festival HAM 2021.	9 November 2021
76.	<i>Workshop Youth Fellowship 2021</i> .	10-11 November 2021
77.	Webinar BHR #11 "Mengukur Sejauh Mana STRANAS dapat Melengkapi RANHAM dan Implikasinya terhadap Implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia".	18 November 2021
78.	Festival HAM 2021.	18 - 20 November 2021
79.	Audiensi secara <i>virtual</i> dengan Dubes RI di Malaysia dan Pakistan.	22 November 2021
80.	Audiensi secara luring dengan Dubes RI untuk Tunisia H.E Zuhairi Misrawi di Ciputat, Tangerang Selatan.	23 November 2021
81.	Pelatihan <i>Risk Assessment Tools</i> (RATs) dalam Upaya Penanganan Deportasi dan Returni bagi BNPT dan Densus 88.	24-26 November 2021
82.	Audiensi draf perpres dan <i>background paper</i> kepada Drs. Wariki Sutikno, MCP (Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas).	01 Desember 2021
83.	Pelatihan <i>Risk Assessment Tools</i> (RATs) dalam Upaya Penanganan Deportasi dan Returni bagi Multi-stakeholders Jawa Timur dan Jawa Barat dan Kementerian Sosial.	1-3 Desember 2021
84.	Audiensi draf perpres dan <i>background paper</i> kepada Ibu Jaleswari Pramodhawardani,	06 Desember 2021

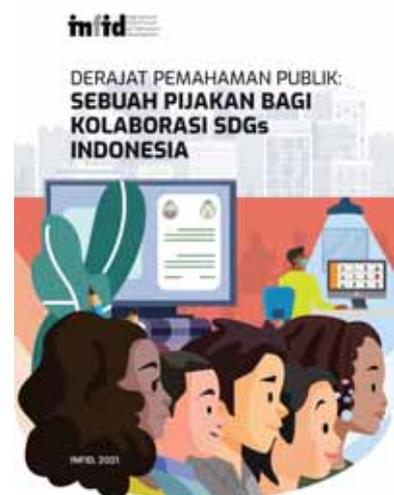
NO	KEGIATAN	TANGGAL
	Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.	
85.	Asesmen kepada Deportan dan Returni di RPTC Kementerian Sosial.	10 Desember 2021
86.	Penyusunan <i>Plan of Operation & Learning Y2 Project KURAWAL</i> .	10 Desember 2021
87.	Workshop pertama dilakukan untuk penelitian "Peran Perempuan dalam Organisasi Berbasis Keagamaan dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan".	11 Desember 2020
88.	"Konsolidasi Masyarakat Sipil dalam Konteks Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Membangun Strategi Advokasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia".	17-18 Desember 2021
89.	Webinar BHR #12 "Satu Dekade UNGPs on BHR: Bagaimana Keadaan Perempuan Disabilitas di Indonesia Saat Ini?"	22 Desember 2021

LAMPIRAN II

DAFTAR SELEKTIF PUBLIKASI SEMUA PROGRAM

NO	KEGIATAN
1.	Kertas Kebijakan Bisnis dan HAM "Pengintegrasian Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan atas Perubahan Iklim dalam Kebijakan tentang Bisnis dan HAM di Indonesia".
2.	<i>Buku Kajian Indikator Kabupaten/Kota HAM: Studi Praktik Penyelenggaraan Kota HAM di Dunia dan di Indonesia.</i>
3.	<i>Buku Human Rights Cities in Indonesia.</i>
4.	Penyusunan Makalah Kebijakan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Radikal Terorisme di Bandung dan Surabaya.
5.	Penelitian kualitatif pertama dengan judul "Ekstremisme dan Intoleransi dalam Beragama: Studi Kasus Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah dan Nasional".
6.	Penelitian kedua berjudul "Aktivisme Islam di Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi: Studi Kasus di SMAN 51 Jakarta, SMAN 31 Jakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Telkom University".
7.	<i>Policy paper "Daya Laku (Agensi) Organisasi Perempuan Berbasis Agama dalam Mencegah Ekstremisme Berkekerasan".</i>
8.	<i>Policy paper "Memutus Dominasi Gerakan Ekstremisme di Perguruan Tinggi Negeri Pasca-Perppu Ormas".</i>
9.	Penyusunan Background Paper (4 Topics) pembentukan Dana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia.
10.	Penyusunan Draft Perpres Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil dan Naskah Keterangan Pentingnya Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Memperkuat Peran dalam Pembangunan dan Demokratisasi Indonesia.

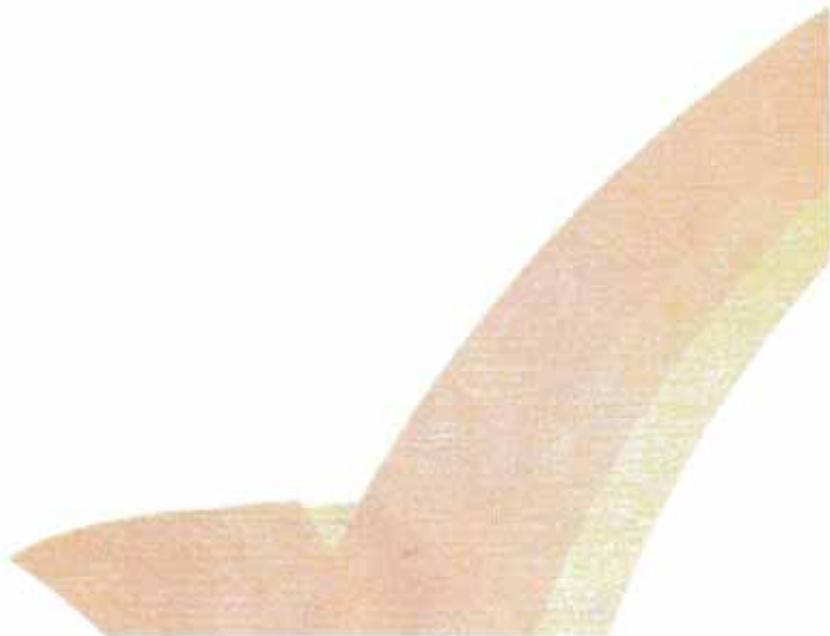
NO	KEGIATAN
11.	Riset "Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan Bagi Kolaborasi SDGs di Indonesia".
12.	Panduan Pelibatan Anak Muda dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
13.	Riset "Persepsi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Agenda Pembangunan TBP 2030".
14.	Laporan Kajian Pemetaan Aktor di Parlemen dan Wacana terkait Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia.
15.	Riset Survei Warga: Ketersediaan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan pada Situasi Pandemi COVID-19 di 6 Daerah.
16.	Riset "Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital" dan <i>policy brief</i> "Urgensi Kebijakan untuk Menangani Ketimpangan Gender Digital, serta Pentingnya Mempercepat Inisiatif Baik OMS untuk Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital".
17.	<i>Policy Brief</i> "Urgensi Kebijakan untuk Menangani Ketimpangan Gender Digital, serta Pentingnya Mempercepat Inisiatif Baik OMS untuk Mendorong Kesetaraan Gender dalam Demokrasi Indonesia di Era Digital".



LAMPIRAN III

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
ATAS / TO
LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS OF
INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. LAI.00042/3.0258/AU.2/11/1668-1/1/VII/2022

Kepada Yth.
Manajemen International NGO Forum on
Indonesian Development (INFID)
Jakarta Selatan

Kami telah mengaudit laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. IAR.00042/3.0258/AU.2/11/1668-1/1/VII/2022

To.
Management of International NGO Forum on
Indonesian Development (INFID)
South Jakarta

We have audited the accompanying financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), which comprise the balance sheet as of December 31, 2021, and statement of activity, changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.



Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Auditor's responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) as of December 31, 2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities.

KAP. S. MANNAN, ARDIANSYAH DAN REKAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK/
PUBLIC ACCOUNTANT FIRM
NIU-KAP / Office License : KEP 1430/KM.1/2012



Hasnawati, CPA
Rekan / Partner

NIAP / Public Accountant License No. AP 1668
Jakarta, 11 Juli 2022/ July 11, 2022

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)
NERACA
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)
BALANCE SHEET
December 31, 2021 and 2020
(In IDR, unless otherwise stated)

URAIAN	2021	Catatan / Notes	2020	DESCRIPTIONS
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	11.293.000.171	2a,2c, 3	4.699.790.514	Cash and cash equivalent
Piutang lain - lain	1.825.371.668	2a,2d, 4	731.702.500	Others account receivable
Uang muka	114.484.570	2a,2e, 5	198.522.200	Advances
Biaya dibayar dimuka	-	2a,2e, 6	17.424.972	Prepaid expenses
Total aset lancar	13.232.856.409		5.647.440.186	Total current assets
Aset tidak lancar				Non current assets
Investasi	2.546.493.606	2a,2f 7	298.057.370	Investment
Aset tetap - nilai buku	334.831.142	2a,2g, 8	434.514.208	Fixed assets - book value
Total aset tidak lancar	2.881.324.748		732.571.578	Total non current assets
Total aset	16.114.181.157		6.380.011.764	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	1.817.889.632	2a,2h, 9	2.275.406.953	Accrued expenses
Utang pajak	84.984.313	2a,2j, 10	32.144.723	Tax payable
Titipan dana	1.752.149.621	2a,2i, 11	298.057.370	Reserved funds
Total liabilitas jangka pendek	3.655.023.565		2.605.609.046	Total current liabilities
Total liabilitas	3.655.023.565		2.605.609.046	Total liabilities
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto akhir tahun		2a,2k, 12		Net assets end of year
- Dengan pembatasan	9.346.529.274		2.736.291.683	With restrictions -
- Tanpa pembatasan	3.112.628.318		1.038.111.036	Without restrictions -
Total aset neto	12.459.157.592		3.774.402.719	Total net assets
Total utang dan aset neto	16.114.181.157		6.380.011.764	Total liabilities and net assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See notes to statement receipts and expenditures that accompanying from this financial statement

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)
 LAPORAN AKTIVITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)
 STATEMENT OF ACTIVITY
 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020
 (In IDR, unless otherwise stated)

URAIAN	2021			Catatan / Notes	2020			DESCRIPTORS
	Dengan Pembatasan / With Restrictions	Tanpa Pembatasan / Without Restrictions	Total		Dengan Pembatasan / With Restrictions	Tanpa Pembatasan / Without Restrictions	Total	
Penerimaan				2a, 2f, 13-14				Receipts
Dana dari Donor	19.310.312.337	-	19.310.312.337		8.949.448.955	-	8.949.448.955	Fund from Donors
Dana dari non Donor	48.736.157	1.911.113.426	1.959.849.583		44.145.692	2.068.652.497	2.112.798.189	Fund from non Donors
Pengembalian dana ke Donor	(90.156.942)	-	(90.156.942)		(70.693.768)	-	(70.693.768)	Refund to Donors
Total penerimaan	19.268.891.552	1.911.113.426	21.180.004.978		8.922.900.880	2.068.652.497	10.991.553.377	Total receipts
Beban				2a, 2f, 15-16				Expenditures
Penelitian dan publikasi	3.749.547.484	-	3.749.547.484		2.196.203.596	-	2.196.203.596	Research and publication
Tindakan advokasi dan politik	625.102.345	-	625.102.345		449.392.587	-	449.392.587	Advocacy and political action
Publikasi, dokumentasi, dan informasi	47.493.750	-	47.493.750		177.714.500	39.229.417	216.943.917	Publication, documentation, and information
Pengembangan kapasitas	1.828.804.649	-	1.828.804.649		781.502.018	31.628.333	813.130.351	Capacity development
Biaya personel	5.063.634.945	838.857.745	5.922.692.690		4.244.475.060	1.057.188.735	5.301.663.795	Personnel cost
Institusional	619.550.748	680.324.761	1.299.875.509		206.908.761	1.161.298.605	1.368.207.366	Institutional
Aktivitas	584.227.543	-	584.227.543		-	-	-	Activity
Perjalanan dinas	600.000	-	600.000		-	-	-	Travel
Administrasi umum	115.940.936	2.016.982	117.957.918		424.635.959	5.258.309	429.894.269	General administration
Penyusutan	-	118.946.197	118.946.197		-	111.256.007	111.256.007	Depreciation
Total beban	12.655.102.400	1.640.145.685	14.295.248.085		8.480.832.481	2.405.859.406	10.886.691.887	Total expenses
SURPLUS (DEFISIT)	6.613.789.152	270.967.741	6.884.756.893		442.068.399	(337.206.909)	104.861.490	SURPLUS (DEFISIT)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Notes to the financial statements as an integral part of the financial statements as a whole

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIA
DEVELOPMENT (INFID)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31
DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIA
DEVELOPMENT (INFID)
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

(In IDR unless otherwise stated)

URAIAN	2021	2020	DESCRIPTIONS
Total penerimaan	21.180.004.978	10.991.553.377	Total receipts
Total beban	14.295.248.085	10.886.691.887	Total expenditures
Kenaikan (penurunan) aset neto	6.884.756.893	104.861.490	Increased (decrease) in net assets
Aset neto awal tahun	3.774.404.739	3.687.693.249	Net asset at the beginning of the year
Sukuk	1.200.000.000	-	Sukuk
Obligasi Ritel Indonesia (ORI018)	600.000.000	-	Obligasi Ritel Indonesia (ORI018)
Penyesuaian aset bersih terikat	-	(18.150.000)	Restricted net asset adjustment
Aset Neto Akhir Tahun	12.459.161.633	3.774.404.739	Net Assets at the End of the Year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(In IDR, unless otherwise stated)

URAIAN	2021	2020	DESCRIPTIONS
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Aset neto sebelum depresiasi	6.765.810.696	(6.394.517)	Net assets before depreciation
Penyesuaian arus kas			Adjustment for reconcile cash flows
Koreksi aset neto	-	(18.150.000)	Net assets Correction
Depresiasi aset tetap	118.946.197	111.256.007	Depreciation of fixed assets
Arus kas sebelum perubahan aset neto	6.884.756.893	86.711.490	Cash flows before changes net assets
Perubahan modal kerja			Changes working capital
Piutang	(1.093.669.168)	(64.598.674)	Account receivables
Uang muka	84.037.630	39.837.383	Advances
Biaya dibayar dimuka	17.424.972	(5.225.037)	Prepaid expenses
Biaya yang masih harus dibayar	(457.517.321)	1.108.358.292	Accrued expenses
Utang pajak	52.839.590	(31.677.739)	Tax payable
Titipan dana	1.752.149.622	298.057.370	Reserved funds
Aset neto tanpa pembatasan (Sukuk dan ORI)	1.800.000.000	-	Net assets without restrictions (Sukuk and ORI)
Arus kas bersih dari operasional	9.040.022.218	1.431.463.085	Net cash flows from operating
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Investasi	(2.546.493.606)	(298.057.370)	Investment
Penambahan aset tetap	(19.263.131)	(32.350.000)	Additional fixed assets
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(2.565.756.737)	(330.407.370)	Net cash flows from investing
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Liabilitas	-	-	Liabilities
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	-	-	Net cash flows from financing
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	6.474.265.481	1.101.055.715	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4.699.792.534	3.487.480.813	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	11.293.004.212	4.699.792.534	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See notes to statement receipt and expenditures that accompanying from this financial statement

LAMPIRAN IV

LAPORAN KELEMBAGAAN

Nota Kesepahaman (MOU) antara INFID dengan Mitra Kerja

NO	MOU ANTARA	TENTANG
1.	International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dengan Kalyanamitra, 16 Februari 2021	Penyusunan Buku Praktik Baik untuk Pendampingan SDG Desa yang Berspektif Gender
2.	Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (PW Fatayat NU) Jawa Timur, 15 April 2021	Pembentukan Forum Multi-Stakeholder Program "Meningkatkan Sistem Reintegrasi untuk Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikalisme Terorisme di Surabaya Jawa Timur"
3.	Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (PW Fatayat NU) Jawa Barat, 15 April 2021	Pembentukan Forum Multi-Stakeholder Program "Meningkatkan Sistem Reintegrasi untuk Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikalisme Terorisme di Bandung, Jawa Barat"
4.	- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI - Kantor Staf Presiden RI - Pemerintah Kota Semarang, 28 April 2021	Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Semarang Tahun 2021 (kegiatan secara <i>virtual/online</i>)
5.	Perkumpulan Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan	Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

NO	MOU ANTARA	TENTANG
	Pembangunan Alternatif (Pra-karsa), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dengan Kaukus Ekonomi Hijau (<i>Green Economy Caucus</i>) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 5 Juli 2021	
6.	International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dengan Green Network (PT Bumi Manusia Berkelanjutan), 19 Oktober 2021	"Perjanjian Kerjasama In-Kind Partnership"
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI - Kantor Staf Presiden RI - Pemerintah Kota Semarang - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 18 Oktober 2021 	Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Semarang Tahun 2021 (kegiatan secara <i>virtual/online</i>)



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

Follow Us :

